



Newsletter

Interfidei

Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia

Daftar Isi

Editorial	1
Fokus	3
Opini	10
Potret	17
Feature.....	25
Refleksi	28
Aktivitas	35
Agenda	40

EDITORIAL

Penanggung Jawab

Elga Sarapung
 Pemimpin Redaksi
 Indro Suprobo
 Tim Redaksi
 Franz, Ira Sasmita,
 Margaret, Indro Suprobo
 Setting/ Layout
 Sarnuji
 Dokumentasi
 Margaret Arintonang
 Keuangan
 Eko Putro Mardiyanto
 Sekretariat
 Ira Sasmita
 Distributor
 Susanto

Diterbitkan oleh
 Institut DIAN/ Interfidei
 Jl. Banteng Utama 59,
 Perum Banteng Baru
 Yogyakarta, 55581,
 Indonesia.
 Phone.:0274-880149.
 Fax.:0274-887864
 E-mail
 dianinterfidei@yahoo.com
 Website
 Http://www.interfidei.or.id.



UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: HARAPAN BAGI PENGANUT AGAMA ATAU KEPERCAYAAN LOKAL

Semoga dapat disebut sebagai sebuah perkembangan baru bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang yang dimaksud adalah UU No.23 Tahun 2006. Pemberlakuan perundangan ini telah pula ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007 sebagai petunjuk pelaksanaan teknisnya. Melalui Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, masyarakat Indonesia yang tergolong sebagai para penganut agama lokal atau para penghayat kepercayaan yang selama ini

POPULATION ADMINISTRATIONLAW: HOPE FOR ADHERENTS OF INDIGENOUS RELIGIONS OR LOCAL BELIEFS

We hope we could call it a new progress that the government of this Republic of Indonesia has put into effect the Regulation Law on Public Administration. The Law referred to is Law No.23 / 2006. The enforcement of this Law has been followed up with issuance of Government Regulation No.37/ 2007 as its technical implementation guideline. Through these Law and Government Regulation, Indonesian community categorized as adherents of indigenous religions or beliefs who this far tend to experience discriminative

cenderung mendapatkan perlakuan diskriminatif, memperoleh jaminan baru untuk mendapatkan layanan pemenuhan hak-hak sipilnya seperti mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian. Bahkan di beberapa daerah tertentu, seperti di desa Ulang, Kecamatan Loksado, Kota Kandangan, kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, masyarakat penganut agama Kaharingan dapat mencantumkan agama Kaharingan dalam kolom agama di KTP mereka. Pada gilirannya, dokumen-dokumen administrasi kependudukan ini akan menjadi dasar bagi penuntutan atas pemenuhan hak-hak yang lainnya seperti tunjangan istri dan anak bagi para pegawai negeri sipil, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk dapat membuka rekening tabungan di bank, hak untuk dapat mengakses layanan kredit dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tersebut, layanan administrasi kependudukan ini dapat diperoleh apabila komunitas atau organisasi penganut agama lokal/ penghayat kepercayaan ini telah mendaftarkan diri kepada Kementerian Dalam Negeri dan instansi yang berada dalam lingkup kementerian ini di tingkat daerah. Di beberapa daerah seperti Kebumen dan Blora, para penganut agama lokal atau penghayat kepercayaan telah dapat memperoleh hak-hak administrasi kependudukannya. Namun demikian, masih perlu dilakukan sosialisasi lebih luas tentang jaminan pemenuhan hak ini ke wilayah-wilayah lain di seluruh pelosok negeri. Informasi kepada para penganut agama lokal atau penghayat kepercayaan perlu diperluas dan diperdalam agar masyarakat penghayat kepercayaan memahami bahwa hak-hak mereka telah mulai dijamin dan bahwa mereka telah memiliki landasan kuat untuk menuntut pemenuhan hak-hak administrasi kependudukannya kepada pemerintah setempat.[]

Selamat membaca

treatment, gained a new guarantee to a public service for fulfillment of their civil rights such as in obtaining their ID Cards (KTP), birth, marriage, and death certificates. Even in a few special regions, such as at Ulang village, Loksado sub-district, Kandangan city, Hulu Sungai Selatan district, South Kalimantan province, adherents of Kaharingan religion are now able to put Kaharingan religion in the religion column of their ID cards. In its turn, these public administration documents will be a basis for demand of fulfillment of their other rights such as wife and child care benefits for civil servants, the right to vote and to be voted in a general election, the right to open a bank account, access credit service, etc.

Based on the aforementioned Government Regulation No. 37 / 2007, this public administration service could be accessed if the congregation or organization adhering to any indigenous religion or local belief has registered themselves to Ministry of Internal Affairs or the instances within the structure of this Ministry at the local level. In a few regions such as Kebumen and Blora, adherents to indigenous religions or local beliefs have indeed obtained their rights to public administration. However, there is still a need to conduct a wider socialization on the guarantee of fulfillment of these rights to other regions across the country. Information to adherents of indigenous religions or local beliefs needs to be spread wider and made more profound so that community members adhering these religions or beliefs understand that their rights have started to be guaranteed and that they have had a strong basis to demand the local government to fulfill their public administration rights. ***

Happy Reading!

DISKRIMINASI OLEH DEFINISI: MASIHKAH TERJADI?

oleh Indro Suprobo

“Di negeri kita tidak dianut istilah agama yang diakui atau tidak diakui Negara. Tugas Negara adalah memberikan perlindungan, pelayanan, serta membantu pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan”

Pernyataan itu secara sangat tegas dan gamblang diucapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam pidato sambutannya pada peringatan hari raya Imlek tanggal 4 Februari 2006 di Jakarta Convention Center. Pernyataan itu mendapatkan sambutan tepuk tangan meriah dari ribuan orang yang hadir dalam perayaan itu. Melalui pernyataan ini seolah-olah Presiden memberikan angin segar dan harapan bagi para pemeluk agama lokal, penghayat kepercayaan dan agama-agama lain yang selama ini berada di luar enam agama mainstream.

Angin segar dan harapan itu muncul karena dalam praktik selama ini, istilah agama yang diakui dan tidak diakui negara ternyata benar-benar dianut oleh aparat pemerintah dan oleh sebagian masyarakat. Penerapan istilah agama yang diakui dan tidak diakui oleh negara ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap para pemeluk agama lokal, para penghayat kepercayaan dan para pemeluk agama-agama lain di luar enam agama yang diakui oleh negara. Bahkan dua jam sebelum presiden berpidato dalam peringatan hari raya Imlek itu, pemukiman jamaah Ahmadiyah di Lombok Barat dirusak dan dibakar massa sehingga enam rumah hangus dan 17 unit rumah lainnya rusak berat, sementara aparat tak berkegiatan sedikitpun untuk berupaya melindungi mereka. Lebih runyam lagi, sehari setelah presiden berpidato, sejumlah massa melakukan demonstrasi menentang keberadaan *gurdwara*, tempat ibadah agama Sikh, di jalan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, kabupaten Tangerang, Jawa Barat. Alasannya, pengelola rumah ibadah itu tidak meminta ijin kepada masyarakat sekitar, padahal, Tommy Singh, ketua Yayasan Dharma Khalsa pengelola *gurdwara* mengaku telah meminta ijin kepada RW setempat dan mengantongi 120 tanda tangan persetujuan dari warga sekitar. Selama ini ibadah yang dilakukan oleh pemeluk agama Sikh di *gurdwara* itu juga tidak pernah mengganggu warga. Anehnya, aparat pemerintah seperti Lurah dan Camat setempat, serta kantor Departemen Agama kota Tangerang justru memberikan dukungan terhadap demonstrasi anti *gurdwara* tersebut. Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan

DISCRIMINATED BY DEFINITION: IS IT STILL HAPPENING?

By Indro Suprobo

“In our country there are no terms for religions officially recognized or not recognized by the state. The task of the state is to provide protection, service, and support to the construction and maintenance of houses of worships”

This statement was strictly and bluntly made by President Susilo Bambang Yudoyono in his welcoming speech in the commemoration of the Chinese New Year on 4 February 2006 at Jakarta Convention Center. This statement was welcomed well with a big clap from thousands of the audience present at the commemoration. Through this statement, the President seemed to give some chance and hope for adherents of local beliefs, believers of faiths, and other religions which that far were beyond the six mainstream religions.

This chance and hope emerged as in the practice even to the present, the terms religions recognized and not recognized by the state are actually followed by the state apparatus and a score of the society. The application of the terms official and unofficial religions (recognized by the state) has caused discriminations against adherents of local beliefs, believers of faiths, and followers of religions other than the six religions recognized by the state. In fact, two hours before the President gave his speech in the commemoration of the Chinese New Year, the settlement of the Ahmadiyah congregation in West Lombok was damaged and set into fire by a crowd. The result was six houses burnt down to ashes and 17 other units of house heavily damaged, while the law enforcers did nothing to try to protect them. Even worse, just one day after the President's speech, a score of mass rallied against the presence of a *gurdwara*, Sikhism house of worship, on Karang Mulya street, Karang Tengah sub-district, Tangerang district, West Java Barat. The justification was that the management of the house of worship never asked for any permission from the surrounding community, whereas Tommy Singh, head of Dharma Khalsa foundation managing the *gurdwara* declared they had indeed asked the permission from the local RW (neighborhood unit) and had 120 signatures as proof of approval from the surrounding locals. So far, the

komitmen Negara untuk memberikan perlindungan, pelayanan, serta membantu pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan sebagaimana secara berapi-api dinyatakan dalam pidato Presiden.

Apa yang disampaikan oleh Presiden dalam pidato sambutan tersebut sejujurnya justru menunjuk kepada kenyataan sebaliknya bahwa selama ini di negeri kita telah dianut istilah agama yang diakui dan agama yang tidak diakui. Bahwa Negara gagal menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan, pelayanan, serta bantuan bagi pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan kepada agama-agama yang tidak diakuiinya itu.

DISKRIMINASI DUA KAKI

Para pemeluk agama lokal atau para penghayat kepercayaan di Indonesia, selama ini telah mengalami diskriminasi dua kaki. Kaki yang satu adalah negara melalui berbagai produk kebijakannya. Kaki yang satunya lagi adalah agama-agama besar yang datang sebagai pendatang, terutama Islam dan Kristen (Protestan dan Katolik), melalui penilaian-penilaian dan praktik yang merendahkan.

Meskipun UU No.5/ Tahun 1969 sebagai penguatan atas Keputusan Presiden No.1/ PNPS/ 1965 mengakui adanya minimal 6 (enam) agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia dan berbagai agama lain yang berkembang di masyarakat, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 477/ 74054 tertanggal 18 November 1978 menyatakan bahwa agama yang diakui resmi oleh pemerintah adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Surat edaran Mendagri ini merupakan pembatasan yang dengan mudah meminggirkan keberadaan para penganut dan penghayat agama lokal atau kepercayaan lokal, serta agama-agama lain yang dianut oleh masyarakat Indonesia seperti Baha'i dan Sikh. Dari sisi pelayanan publik, diskriminasi terhadap mereka diteguhkan oleh Tap MPR no.IV/ MPR/ 1978 tentang GBHN yang menyatakan bahwa Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Tap ini ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama no.4/ 1978 tentang Kebijakanaksanaan mengenai aliran-aliran Kepercayaan dan Instruksi Menteri Agama no.14/ 1978 tentang Tindak Lanjut Instruksi Menteri Agama no.4/ 1978 yang pada intinya menyatakan bahwa Departemen Agama tidak mengurus persoalan aliran-aliran kepercayaan yang bukan merupakan agama. Di samping berbagai produk kebijakan ini, definisi tentang agama yang diproduksi oleh pemerintah yang mempersyaratkan adanya nabi, ajaran yang jelas dan kitab suci, juga telah meminggirkan keberadaan para penganut agama dan kepercayaan lokal.

Produk kebijakan yang diskriminatif ini mengakibatkan para penganut agama lokal atau penghayat kepercayaan, terutama mereka yang disebut

worshipping activities carried out by the adherents of the Sikh religion at the *gurdwara* also never disturbed the locals. Oddly, government apparatus, such as the local head of the village and head of the sub-district, and office of the Religious Affairs of Tangerang city gave their support instead to the demonstration against the *gurdwara*. This very fact is definitely against commitment of the state to provide protection, service, and support to the construction and maintenance of any houses of worship as so spiritedly claimed in the President's speech.

What was conveyed by the President in his above welcoming remarks are frankly pointing at the opposite reality instead that up to now, in this very own country of ours, the terms official and unofficial religions (recognized and unrecognized by the state) do exist; that the state has failed to carry out its task to provide protection, service, and support for the construction and maintenance of houses of worships of religions it does not recognize.

TWO-FEET DISCRIMINATION

Adherents to local beliefs or believers of faiths in Indonesia have until today experienced a two-feet discrimination. One foot is the state through its many policies. The other foot is main religions which came as newcomers to the land, in specific Islam and Christianity (Protestantism and Catholicism), through condescending judgments and practices.

Even though Law No.5 / 1969 as support of the Presidential Decree No.1/PNPS/1965 recognized minimum 6 (six) religions embraced by the people of Indonesia in addition to other religions developing in the midst of the society, the Circular Note of the Ministry of Internal Affairs no. 477/74054 dated 18 November 1978 declared that the religions officially recognized by the state are Islam, Catholicism, Protestantism, Hinduism, and Buddhism. This circular note of the Ministry of Internal Affairs served as a restrictor easily marginalizing adherents and believers of faiths, indigenous religions or local beliefs, as well as other religions embraced by the people of Indonesia such as Baha'i and Sikhism. From the public service point of view, discrimination against them was further reinforced by Tap MPR (Decree of the People's Consultative Assembly) no.IV/MPR/1978 on GBHN (State Policy Guidelines) which states that Beliefs in God is not a religion. This Decree was followed with Instruction of the Minister of Religious Affairs no.4 / 1978 on the Policy on other spiritualism (beliefs or faiths) and Instruction of the Minister of Religious Affairs no.14/1978 on the Follow-up of the Instruction of the Minister of Religious Affairs no.4/1978 which in

sebagai “penghayat murni” (para penghayat yang tidak mencantumkan agama apapun dalam KTP dan tidak menjalankan syariat agama apapun kecuali agama atau kepercayaan lokalnya) tidak mendapatkan hak-hak sipilnya dari pemerintah. Pernikahan di kalangan mereka tidak mendapatkan akte dari kantor Catatan Sipil karena kantor Catatan Sipil tidak mau mencatatnya dengan alasan bahwa pernikahan mereka itu adalah pernikahan di luar agama atau pernikahan yang tidak berdasarkan agama. Akibat lanjutnya, anak-anak yang lahir dari perkawinan ini juga tidak mendapatkan akta kelahiran.² Kaum perempuan dan anak-anak dari para penghayat ini pada gilirannya mengalami diskriminasi dan kekerasan berlapis. Karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), perempuan kehilangan hak-hak dasarnya dalam politik dan akses terhadap layanan publik seperti layanan hukum dan layanan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi yang sangat ia butuhkan. Karena perkawinannya tak tercatat, perempuan tidak memiliki kekuatan hukum jika mengalami kekerasan oleh suami, termasuk poligami. Ketika terjadi perceraian atau suami meninggal dunia, perempuan kehilangan hak atas harta suami dan demikian pula anak-anak hasil perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak haram dan tidak mendapatkan haknya untuk bertumbuh dan berkembang.³ Selain itu, para penghayat kepercayaan yang menjadi pegawai negeri sipil, tidak mendapatkan hak tunjangan anak atau istri.⁴ Lebih tragis lagi, anak-anak dari keluarga penghayat kepercayaan atau agama lokal ini dapat kehilangan hak atas pendidikannya hanya karena orangtuanya adalah penghayat kepercayaan murni. Ini secara nyata dialami oleh Maman Suryaman, seorang warga Tasikmalaya yang anaknya tidak dapat melanjutkan pendidikannya di salah satu sekolah SMP di sana. Sekolah menyodori formulir agar wali murid memilih salah satu agama yang ada. Apabila wali murid tidak mengisi formulir itu dengan pilihan agama yang ditentukan tersebut, anak tersebut tidak boleh melanjutkan sekolah di sana.⁵ Semua kepahitan ini dialami oleh para penganut agama atau kepercayaan lokal hanya karena mereka tidak termasuk dalam definisi yang diproduksi oleh pemerintah.

Di hadapan agama-agama pendatang, agama-agama dan kepercayaan lokal ini sering dipandang rendah, primitif, tradisional, tidak rasional dan sebagainya. Hanya sebagai salah satu dari sekian banyak contoh, kita ambil saja pengalaman masyarakat Dayak di Kalimantan. Sebagaimana dipaparkan oleh Stepanus Djuweng,⁶ pada masa sebelum merdeka, “Dayak” merupakan kata ejekan yang memilukan hati. Ketika seseorang dianggap menyimpang dari norma umum yakni norma Islam dan norma penjajah Belanda maka orang tersebut akan disebut sebagai “dayak”. Kata “dayak” diartikan sebagai kata yang menunjuk pada kotor, kafir, tidak tahu aturan, buas, liar, gila, terbelakang, dan tidak berbudaya. Bahkan ikan dan belacan busuk serta anjing kurus dan berkurap yang

principal stated that Department of Religious Affairs did not deal with affairs of faiths that are not (recognized as) religions. In addition to these various products of policies, the definition of religions produced by the government itself requiring the presence of a prophet, distinct teachings, and Holy Book, had also set aside the presence of adherents to indigenous religions and local beliefs.

These discriminative policy products result in adherents of indigenous religions or believers of faiths, in specific those referred to as “true believers of faiths” (believers of faith who do not put any religion in their ID cards and do not carry out the laws of any religion other than that of his/her indigenous religion or local belief) cannot have their civil rights fulfilled the government. When the people in their circle get married, they will not obtain any marriage license from the Civil Registry office since the office would not make the registry under justification that the marriage is outside of any religion, or is not based on religion. As a further consequence, the children born of this marriage also do not get any Birth Certificate.² Women and children of the believers of faiths in turn have to undergo layered discrimination and violence. As a woman does not have any ID card (KTP), she would lose her constitutional rights in politic and will not be able to gain access to the public service such as legal and health services, especially reproductive health service she needs the most. Since her marriage is not registered, she would not have any legal power if she experiences domestic violence conducted by her husband, including polygamy. When a divorce happens or when the husband passes away, the woman would lose her right over the wealth of her husband, as would the children of the marriage. These children born of the marriage would be considered as illegitimate children and would not gain their right to grow and develop.³ In addition, believers of faiths who worked as civil servants would not get any benefits for the children or the wives.⁴ More tragically, children of the families of believers of faiths or indigenous religions could lose their rights over education just because their parents are true believers of faiths. This experience is in fact is undergone by Maman Suryaman, a resident of Tasikmalaya whose child cannot continue his education at the local Junior High School. The school asked the student's parents or guardians to fill out a form and choose one of the existing official religions. If the parent or guardian of the student does not fill out the form by choosing one of the official religions, the student cannot continue his/her education there.⁵ All this bitterness has to be borne by adherents of indigenous religions or local beliefs just because they do not belong in the definition produced by the government.

In the face of the new religions coming to the land, these indigenous religions and local beliefs are

dijumpai di jalan disebut juga sebagai dayak. Pada masa kebijakan pendidikan kolonial, apabila orang Dayak ingin mengenyam pendidikan sekolah lebih dari kelas 3, mereka harus masuk agama Islam, meninggalkan identitas budaya, agama, sosial dan politik mereka. Apabila memasuki dinas kepegawaian kolonial untuk promosi jabatan, mereka juga harus melepaskan identitas ke-Dayak-an mereka. Agama Kristen (Protestan, Katolik dan Anglikan) menganggap praktik keagamaan asli masyarakat Dayak sebagai praktik pemujaan berhala, menyembah patung, menyembah batu dan kayu. Berbagai bentuk pemujaan yang aseli dengan berbagai nyanyian, pujian, persembahan dan korban dianggap sebagai primitif, tradisional, dan tidak rasional sehingga harus dibuang dan ditinggalkan. Tempat-tempat keramat juga harus dihilangkan. Penyebaran agama kristen yang dinilai sebagai sebuah misi suci, dipahami oleh para penganut agama Kristen sendiri sebagai upaya "memberadabkan" orang-orang biadab (*sauvage*).

Sikap superior terhadap agama-agama dan kepercayaan lokal ini secara sangat jelas ditemukan dalam sikap dan pandangan Gereja Katolik Roma. Sebuah dokumen resmi yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II, yakni Dekrit tentang Kegiatan Misioner Gereja (Ad Gentes) artikel 9 menyatakan bahwa:

...Kebenaran atau rahmat manapun, yang sudah terdapat pada para bangsa sebagai kehadiran Allah yang serba rahasia, dibebaskannya dari penularan jahat dan dikembalikannya kepada Kristus Penyebabnya, yang menumbangkan pemerintahan setan serta menangkai pelbagai kejahatan perbuatan-perbuatan durhaka. Oleh karena itu *apapun yang baik, yang terdapat tertaburkan dalam hati dan budi orang-orang, atau dalam adat kebiasaan serta kebudayaan-kebudayaan yang khas para bangsa, bukan hanya tidak hilang, melainkan disembuhkan, diangkat dan disempurnakan demi kemuliaan Allah*, untuk mempermalukan setan dan demi kebahagiaan manusia...⁷

Tampak jelas dalam dokumen ini bahwa Gereja Katolik menempatkan (apapun yang baik dari) agama-agama lokal dalam terminologi penyakit (disembuhkan), lebih rendah (diangkat) dan tidak sempurna (disempurnakan). Dalam sikap dan pandangan ini terlihat bahwa otoritas menyembuhkan, mengangkat dan menyempurnakan ada dalam diri Gereja Katholik. Oleh karena itu, dalam istilah teknisnya, agama-agama atau kepercayaan lokal ini pantas untuk dikristenkan. Diksi yang dipilih dan digunakan oleh dokumen maha resmi dan penting dalam lingkup Gereja Katolik ini mengindikasikan cara berpikir, cara pandang, dan cara bersikap terhadap agama dan kepercayaan local yang hidup di tengah kebudayaan bangsa-bangsa. Agama dan kepercayaan local merupakan *kenyataan yang sakit* sehingga harus *disembuhkan*, merupakan *kenyataan yang lebih rendah* sehingga harus *diangkat*, dan merupakan *kenyataan yang tidak sempurna* sehingga harus *disempurnakan*. Seluruh cara untuk menyembuhkan, mengangkat dan

often viewed as low, primitive, traditional, irrational, etc. As one of so many examples, we will see the experience of the Dayak people in Kalimantan. As described by Stepanus Djuweng,⁶ at the time before the independence, the word "Dayak" was a condescending, harsh word. When one was considered deviating from the common norms namely Islamic norms and the Dutch colonial norms s/he would be called a "dayak". The word "dayak" here was associated with dirty, infidel, impolite, savage, wild, crazy, backward, and uncivilized. Even rotten fish and dried shrimp paste as well as thin, scabby dogs seen at the streets then were called dayak. At the time of the colonial education policy, when a Dayak would like to go to a higher education than the 3rd grade, they had to convert to Islam, leaving behind their cultural, religious, social, and political identities. When they entered a service for the colonial, in order to obtain a career promotion, they were to release their Dayak-nese identity as well. Christianity (Protestantism, Catholicism, and Anglican) considered indigenous religious practices of the Dayak community as practices of idol worshipping: worshipping statues, stones, and wood. Various forms of indigenous worshipping with assorted singing, praise, worship, and sacrifice were considered as primitive, traditional, and irrational, and consequently, must be disposed of and left behind. Sacred areas should also be abolished. The dissemination of Christianity was valued as a holy mission, understood by Christians as an effort to "civilized" the savages.

Superiority toward these local religions and beliefs is clearly found in the outlook and view of the Roman Catholic Church. An official document from Vatican Council II, a Decree on the Missionary Activity of the Church (Ad Gentes) article 9 stated that:

... But whatever truth and grace are to be found among the nations, as a sort of secret presence of God, He frees from all taint of evil and restores to Christ its maker, who overthrows the devil's domain and wards off the manifold malice of vice. And so, *whatever good is found to be sown in the hearts and minds of men, or in the rites and cultures peculiar to various peoples, not only is not lost, but is healed, uplifted, and perfected for the glory of God*, the shame of the demon, and the bliss of men....⁷

It is clear in this document that the Catholic Church positions (whatever good is found) the local religions in the term of disease (is healed), lower (uplifted) and imperfect (is perfected). In this outlook and perception, it is clearly seen that the authority to heal, uplift, and perfect lie in the Catholic Church. Therefore, in its technical term, local religions or beliefs

menyempurnakannya tiada lain kecuali dengan mengkristenkannya. Dalam kekristenan itulah ditemukan kesembuhan, derajat yang tinggi, dan kesempurnaan. Pandangan merendahkan agama-agama lokal ini tampaknya tidak berkaitan dengan pendefinisian agama oleh Pemerintah Indonesia melainkan sudah jauh-jauh hari melekat dalam pandangan Gereja Katolik sendiri sebagai warisan dari etnosentrisme Eropa. Namun demikian, meskipun dokumen resminya menyatakan demikian, dalam praktik kehidupan sehari-hari, sikap dan cara pandang anggota-anggota Gereja ini terhadap agama-agama lokal dapat dan sangat mungkin berbeda dari sikap dan cara pandang dokumen resminya. Ini sangat tergantung kepada dinamika pergulatan pemikiran masing-masing dalam konteks lokal.

SEBUAH HARAPAN?

Pada tanggal 29 Desember 2006, Pemerintah Indonesia telah mengundangkan sebuah kebijakan baru yakni Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebagai petunjuk pelaksanaan UU tersebut, telah diterbitkan pula Peraturan Pemerintah (PP) No.37 Tahun 2007. Bab VI Pasal 64 ayat (2) UU No.23/2006 ini menyatakan bahwa keterangan tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tidak diisi atau dikosongkan, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Sementara Bab X Pasal 81 PP No.37 tahun 2007 mengatur tentang persyaratan dan tatacara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Kebijakan ini merupakan perkembangan baru bagi nasib para penghayat kepercayaan atau agama lokal dengan syarat bahwa kelompok penghayat kepercayaan atau agama lokal ini harus mendaftarkan diri kepada kementerian yang terkait. Mereka yang sudah mendaftarkan diri, dengan sendirinya akan mendapatkan layanan. Sebagian penghayat kepercayaan telah mendapatkan akta perkawinan berkat kebijakan baru ini. Tugiman dan Wahyuni yang tinggal di desa Bumirejo Kecamatan Puring, kabupaten Kebumen Jawa Tengah

needs to be Christianized. The diction chosen and used by this all-official and important in the circle of the Catholic Church indicate the way of thinking, the viewpoint, and stance towards local religions and beliefs living in the midst of the culture of the nations. Local religions and beliefs are *a sick reality to be healed, a lower reality to be uplifted, and an imperfect reality to be perfected*. The only way to heal, uplift, and perfect it is no other than to Christianize them. It is only in this Christianity can cure, a higher degree, and perfection be found. This condescending view towards local religions did not seem to be related to the defining of religions by the government of Indonesia, but seemed to had attached to the views of the Catholic Church itself since long ago as an inheritance from Europe's ethnocentrism.

A HOPE?

On 29 December 2006, the government of Indonesia passed a new policy in the form of Law No.23 / 2006 on Population Administration. As the technical implementing guideline of the Law, a Government Regulation (PP) No.37 / 2007 was issued. Chapter VI Article 64 verse (2) of Law No.23 / 2006 states that the information on religion for citizens whose religions have yet to be recognized as a religion based on the legislation or for believers of faith, should not be emptied, but is still served and recorded in the population database. Meanwhile, Chapter X Article 81 of the Government Regulation No.37 / 2007 manages the requirements and rules for marriage registry for believers of faith with following details:

- (1) Marriage of the believers of faith shall be carried out before Leaders of the faith
- (2) Leaders of the believers of faith as referred to in verse (1) is appointed and decided by the believers of faith organization to fill out and sign the marriage certificate of the believers of faith
- (3) Leaders of the believers of faith as referred to in verse (2) are registered under the Ministry which technical function manages the organization of the believers of God

This policy is a new progress for the fate of the believers of faiths or adherents of local religions, under the requirement that this group of believers of faiths or local religion register themselves to the related Ministry. Those who have registered themselves will automatically be served. Some of believers of faiths have obtained their marriage certificates thanks to this new policy. Tugiman and Wahyuni who live at the village of Bumirejo, Puring sub-district, Kebumen

telah menerima akta nikah dari kantor Catatan Sipil setempat.⁸ Dinas Pencatatan Sipil dan kependudukan Kabupaten Blora juga sudah mengakui lima aliran kepercayaan di wilayahnya yang sudah didaftar oleh kementerian Dalam Negeri. Lima aliran kepercayaan itu adalah Weringin Seta, Sastra jendra Hayuningrat Mustika Sejati, Pasebon Jati, Kejaten, dan Kekadangan Kayuhanan. Pramugi Prawiro Wijoyo, salah seorang tokoh Sedulur Sikep (penganut ajaran Samin) menyatakan sangat senang dengan munculnya kebijakan ini karena mengakui keberadaan penganut kepercayaan, terutama telah dilayaninya pencatatan perkawinan.⁹

Kebijakan tentang layanan administrasi kependudukan yang telah memberikan harapan baru dan angin segar bagi pemenuhan hak-hak para penghayat kepercayaan atau agama lokal ini tentu saja masih memerlukan upaya sosialisasi secara luas agar semakin banyak pemerintah daerah memberikan jaminan dan layanan tersebut. Masyarakat penganut agama lokal atau penghayat kepercayaan juga perlu mendapatkan informasi tentang kebijakan ini agar mereka memiliki landasan kuat ketika menghadapi aparat pemerintah yang belum mau memberikan layanan bagi pemenuhan hak-hak sipil mereka.

Penerbitan kebijakan tentang administrasi kependudukan yang dilengkapi dengan peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya ini tampaknya masih menyisakan pertanyaan yang menggantung. Apakah jaminan pemenuhan hak bagi para penganut agama lokal atau penghayat kepercayaan ini juga akan merambah kepada hak-hak atas pendidikan dan pendirian tempat ibadah? Apakah anak-anak penghayat kepercayaan yang menjalani pendidikan di sekolah-sekolah umum akan mendapatkan layanan atau alternatif layanan bagi pendidikan agama mereka? Ataukah mereka masih harus memilih untuk mengikuti pendidikan agama yang bukan agama mereka sendiri sebagaimana dialami selama ini? Apakah melalui kebijakan ini, dengan sendirinya para penghayat kepercayaan yang menjadi pegawai negeri sipil akan mendapatkan tunjangan bagi istri dan anak setelah perkawinan mereka mendapatkan akta dari kantor Catatan Sipil?

Pengakuan negara terhadap para penganut agama atau kepercayaan lokal ini semestinya membuat para pemeluk agama-agama penganut di Indonesia dapat bersikap lebih adil, rendah hati, tidak sombong dan arif. Para penganut agama penganut di Indonesia semestinya tidak perlu merasa khawatir dan resah apabila dengan pengakuan ini, anggota jamaah atau jemaatnya berkurang karena di antara mereka ada yang memi-

district, Central Java have obtained their marriage certificate from the local Civil Registry office. The Civil Registry and Population Service of Blora district has also recognized five faiths in the local area that have been registered to the Ministry of Internal Affairs. The five faiths are Weringin Seta, Sastra jendra Hayuningrat Mustika Sejati, Pasebon Jati, Kejaten, and Kekadangan Kayuhanan. Pramugi Prawiro

Wijoyo, one of the Sedulur Sikep figures (followers of Samin teachings) expressed his happiness of the policy, as it recognizes the presence of believers of faiths, especially after the service of marriage registration.

Policy on the population administration

providing new hope and fresh opportunity for fulfillment of the rights of believers of faiths or local religions of course still requires wider socialization efforts so that more local governments would provide their citizens with the guarantee and the service. Members of the community adhering local religions or believers of faiths should also obtain the information on this policy so that they would have a strong basis when dealing with government apparatus who still do not want to provide service for the fulfillment of their civil rights.

The issuance of the policy on population administration completed with Government Regulation as its technical implementation guideline seems to still leave an unanswered question: Will this guarantee for fulfillment of the rights for adherents of the local religions or believers of faiths also cover their rights for education and establishment of their houses of worship? Will children of believers of faiths who are going to public schools obtain service or an alternative of service for their religious education? Or do they still have to choose to follow a subject of religion not of their own, as experienced thus far? Through this policy, will the believers of faiths who work as civil servants receive the benefits for their wives and children after they obtain marriage license from the office of Civil Registry?

This recognition of the state towards adherents of local religions or beliefs should make adherents of the newcomer religions in Indonesia act

**Apakah
anak-anak penghayat kepercayaan
yang menjalani pendidikan
di sekolah-sekolah umum
akan mendapatkan layanan atau
alternatif layanan bagi
pendidikan agama mereka?**

lih untuk kembali memeluk agama lokal atau kepercayaan lokal secara bebas-merdeka dan bermartabat.

Keluarnya kebijakan Negara yang telah mulai mengakui keberadaan penganut agama atau kepercayaan local ini tampaknya sangat perlu diimbangi oleh revisi pandangan dan sikap teologis yang lebih egaliter dan adil dari agama-agama besar seperti Islam dan Kristen. Untuk mengimbangi pengakuan Negara ini, sangatlah dibutuhkan sebuah teologi yang barangkali dapat disebut sebagai *Teologi Karib* atau *Teologi Sahabat*, yakni teologi yang secara sangat kuat berakar pada kesanggupan untuk secara empatik menempatkan diri sendiri ke dalam posisi suka-cita dan duka-nestapa terdalam dari yang lain. Dengan kata lain, ini sebuah teologi yang merupakan pengejawantahan dari kesiap-sediaan yang penuh ikhlas dan rasa syukur luar biasa untuk merasakan secara empatik perasaan-perasaan dari yang lain pada level yang paling mendalam. Berdasarkan mandat etis-humanistik yang dimilikinya, agama-agama justru dituntut untuk lebih mampu mendorong pemerintah dan negara agar melakukan daya upaya bagi terwujudnya masyarakat yang bahagia, keadilan sosial, perdamaian politik, dan perlindungan bagi keragaman pengalaman, kepentingan, serta gagasan bagi masa depan. Meminjam istilah yang digunakan oleh Erick Fromm, barangkali kita bisa mengatakan bahwa *Teologi Karib* adalah teologi yang membebaskan diri kita dari kecenderungan untuk “memiliki” dan menghantar kita kepada kesiap-sediaan untuk menyediakan ruang luas bagi yang lain untuk “menjadi”.[]

more fair, humble, not arrogant, and wise. Adherents of newcomer religions in Indonesia should not feel worried and anxious if with this recognition, members of their congregation would decrease as some may choose to re-embrace their local religions of beliefs freely and with dignity.

The issuance of the state policy that commenced recognizing the existence of adherents of local religions or beliefs seems need to be balanced with a revision of the theological viewpoint and outlook of a more egalitarian and just from the major religions such as Islam and Christianity. To balance this recognition of the state, it is imperative to have a theology that could be referred to as a *Theology of Familiarity* or *Theology of Friends*, i.e. a theology sturdily rooted in one's capacity to voluntarily places him/herself in the deepest joy and sorrow of others. In other words, it is a theology of realization of sincere willingness and incredible thanksgiving to feel empathetically the feelings of other people at the deepest level. Based on the ethical-humanistic mandate they have, religions are demanded instead to be more able to encourage the government and the state to do every effort they can to realize a happy community with social justice, political peace, and protection for diverse experiences, interests, and notions for the future. Borrowing the term used by Erick Fromm, perhaps we can even say that *Theology of Familiarity* is a theology that would free us from the tendency to “possess” and take us to willingness to provide space for others to “become”.[]

1. *Bebas Lisensi Setengah Hati*, Laporan Utama, Gatra Nomor 16, Senin 27 Februari 2006

2. Lih. Sulistyio Tirtokusumo sebagai Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, dalam <http://www.purnomosidi.or.id>

3. Lih. Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi atas Uji Materi UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Jakarta, 21 April 2010

4. Benyamin F Intan, *Kepercayaan Masuk Kolom KTP*, dalam <http://www.indonesia.faithfreedom.org/forum>

5. Sulistyio Tirtokusumo sebagai Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, dalam <http://www.purnomosidi.or.id>

6. Stepanus Djuweng, “Orang Dayak, Pembangunan dan Agama Resmi”, dalam *Kisah Dari Kampung Halaman, Masyarakat Suku, Agama Resmi dan Pembangunan*, Interfidei Jogjakarta 1996, cetakan Pertama, hlm.25-32

7. R. Hardawiryana, SJ (Penerj), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Dokumentasi dan Penerangan KWI & Obor, 1993, Cet. Kedua, hlm.413, cetak miring oleh Indro Suprobo

8. Lih. Perkawinan Penghayat Kepercayaan, dalam <http://www.hpk-nusantara.org/2010/04/06/perkawinan-penghayat-kepercayaan>

9. *Sah, Perkawinan Penganut Kepercayaan*, Blora CyberNews, 30 Maret 2010

1. *Bebas Lisensi Setengah Hati*, Focus Report, Gatra No. 16, Monday 27 February 2006

2. See Sulistyio Tirtokusumo as Director of Beliefs in God, in <http://www.purnomosidi.or.id>

3. See Stand of National Commission for Women towards Verdict of the Constitutional Court on Material Testing Law No. 1/PNPS/1965 on Prevention of Abuse and/or Desecration of Religions, Jakarta, 21 April 2010

4. Benyamin F Intan, *Kepercayaan Masuk Kolom KTP*, in <http://www.indonesia.faithfreedom.org/forum>

5. Sulistyio Tirtokusumo as Director Beliefs in God, in <http://www.purnomosidi.or.id>

6. Stepanus Djuweng, “Orang Dayak, Pembangunan dan Agama Resmi”, in *Kisah Dari Kampung Halaman, Masyarakat Suku, Agama Resmi dan Pembangunan*, Interfidei Jogjakarta 1996, First edition, pp.25-32

7. R. Hardawiryana, SJ (Translator), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Documentation and Elucidation of KWI & Obor, 1993, Second edition, pp.413, italics by Indro Suprobo

8. See Marriage of Believers of Faiths, in <http://www.hpk-nusantara.org/2010/04/06/perkawinan-penghayat-kepercayaan>

9. *Sah, Perkawinan Penganut Kepercayaan*, Blora CyberNews, 30 March 2010



KEPERCAYAAN MARAPU DAN LEGALITAS PEMERINTAH

Yetty Leyloh*¹

MARAPU BELIEF AND LEGALITY OF THE GOVERNMENT

By Yetty Leyloh*¹

Pulau Sumba merupakan salah satu pulau yang terdapat di Propinsi Nusa Tenggara Timur, di mana masih dijumpai masyarakat Sumba yang tradisional, baik dari sisi cara hidup maupun cara berpikirnya. Sumba juga dikenal dengan budayanya yang eksotik, tenunan kain yang asri serta kuburan-kuburan batu yang unik. Semua yang tampak ini merupakan akumulasi dari satu kepercayaan yang sangat terkait dengan kehidupan para leluhur, yang oleh orang Sumba disebut Marapu.

Sumba island is one of the islands located at the Province of East Nusa Tenggara, where one still could meet traditional Sumbanese community, whether from the perspective of life style or their way of thinking. Sumba is also widely known for its exotic traditions, hand-woven fabric, and unique megalithic burials. All these visible inheritance are an accumulation of a belief closely related to the life of the ancestors, which is referred to as Marapu by the Sumbanese.

APA DAN SIAPA MARAPU

Ada beberapa pengertian dari kata Marapu., L. Onvlee menyatakan bahwa Marapu terdiri dari dua kata yaitu: *ma* dan *rapu*, *ma* berarti "yang" dan *rapu* berarti "dihormati", "disembah" (Kapita, 1976:87). Menurut A.A.Yewangoe, kata Marapu terdiri dari *ma* dan *rappu*, kata *ma* artinya "yang" dan kata *rappu* artinya "tersembunyi", "tidak dapat dilihat". Kemudian Yewangoe memberikan kemungkinan lain dengan melihat kata *mera* dan *appu*, kata *mera* artinya "serupa" dan *appu* artinya "nenek moyang", jadi Marapu adalah serupa dengan nenek moyang (Yewangoe, 1980:53). Menurut Nggodu Tunggul, kata Marapu berasal dari kata *ma* yang artinya "yang" dan *rap-pu* yang artinya "mengkristal ke dasar" yang diartikannya sebagai "yang telah rampung", "yang telah beres" "telah selesai" (Tunngul, 2004:21). Yang dimaksud dengan "telah rampung, telah beres, telah selesai" adalah dalam hubungan dengan nenek moyang "yang telah meninggal" "yang telah selesai" dikuburkan sesuai dengan aturan adat istiadat. Jasadnya telah dikuburkan dan jiwanya telah berada di tempat Yang Ilahi dan dapat menjadi penghubung antara manusia dengan Yang Ilahi. Pengertian yang lebih luas dikatakan oleh C. Nootboom bahwa Marapu adalah kekuatan supra natural yang berpribadi ataupun tidak, yang tampil dalam berbagai bentuk dan juga dapat berarti suci, sakti, mulia sehingga harus dihormati dan tak dapat diperlakukan sembarangan (Wellem, 2004:41).

Marapu adalah roh-roh leluhur yang menjadi cikal-bakal orang Sumba dan juga yang berpribadi. Mereka percaya bahwa roh-roh tersebut dapat memberi berkat ataupun menghukum mereka. Kepercayaan Marapu terkait erat dengan mitos-mitos religius yang berfungsi mempererat ikatan persekutuan mereka. Marapu sebagai tokoh yang berpribadi, karena Marapu diyakini sebagai leluhur pertama yang datang di Sumba, yang memberikan segala bentuk tata cara dan adat istiadat demi kelangsungan hidup manusia. Para Marapu sebagai leluhur berupa kekuatan-kekuatan gaib penghuni kosmos dan penghuni "dunia seberang" (*Wano Marapu*). Yang dimaksud "dunia seberang" adalah satu dunia yang tidak kelihatan dan diyakini dihuni oleh roh para Marapu yang mempunyai struktur masyarakat yang sama dengan dunia manusia.

Marapu juga merupakan **mediator** manusia dengan Sang Khalik. Karena itu Marapu selalu disebut antara lain sebagai: *Ina Pulu-Ama Kandouka* (Ibu pembicara-Bapa penutur); *Andikita pala'o-Anoneka pamaina* (yang beranjak ke sana dan yang beralih ke mari); *Apadukina mbara Ina-Apatomana mbara Ama* (Yang mengatakan kepada Ibu-Yang menyampaikan kepada Bapa) (Beding, dkk., 2002:33-34). Keharmonisan hubungan manusia dengan para Marapu harus selalu dipelihara yaitu dengan menjalani segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh para Marapu dalam ritual-ritual.

WHAT AND WHO MARAPU IS

There are a few understandings of the word Marapu., L. Onvlee stated that Marapu consists of two words: *ma* and *rapu*, *ma* meaning "which" and *rapu* means "the respected one", "the worshipped one" (Kapita, 1976:87). On the word of A.A.Yewangoe, the word Marapu consists of the words *ma* and *rappu*, *ma* means "which" and *rappu* means "the hidden one", "the invisible". Yewangoe then gave another alternative by seeing the words *mera* and *appu*; the word *mera* means "alike" and *appu* means "ancestors", so Marapu means ancestors alike (Yewangoe, 1980:53). According to Nggodu Tunggul, the word Marapu originated from the word *ma* meaning "which" and *rap-pu* which means "crystallized to the bottom" which he interpreted as "the finished one", "the completed one", or "the ended one" (Tunngul, 2004:21). What is meant with "the finished, completed, or ended one" is concerning the dead ancestors who have been buried in accordance with traditions and customs. Their bodies have been buried and their souls have rested in the Divine place and therefore could act as mediators between human beings and the Divine One. A wider interpretation is provided by C. Nootboom, that Marapu is a supra natural power whether with personality or not, appear in various forms, and could also mean holy, sacred, and heavenly so that they have to be respected and cannot be treated without any respect (Wellem, 2004:41).

Marapu is the spirits of the ancestors with personality that are the origins of the Sumbanese. They believe that the spirits could give blessings or penalties. Marapu belief is closely related to religious myths functioning to tighten their bonds. Marapu is a figure with personality, as Marapu is believed as the first ancestors ever existed in Sumba; one passing down all forms of traditional rituals and customs for the continuation of human life. The Marapu as ancestors take the form of supernatural strengths dwelling in the cosmos world and in the "other world" (*Wano Marapu*). What is meant by "the other world" is an invisible world believed to be inhabited by the spirits of the Marapu with similar social structure as the human world.

Marapu also serves as the **mediator** between human being and The Creator. Therefore, Marapu is always referred to as among others: *Ina Pulu-Ama Kandouka* (Mother speaker Father talker); *Andikita pala'o-Anoneka pamaina* (one that moves there and shift here); *Apadukina mbara Ina-Apatomana mbara Ama* (One who speaks to Mother One who conveys to Father) (Beding, dkk., 2002:33-34). The harmony between human beings and the Marapu has to be maintained by means of following the rules set by the Marapu in rituals.

These rules have been put in place by the first ancestors who arrived in Sumba at Tanjung Sasar. These ancestors also served as justice putting into trial those deviating from customs and traditions. Compliance to these rules is carried out by maintaining loyalty in holding sacrifice rites and efforts to please the Marapu with

Tata tertib itu telah ditetapkan oleh para leluhur pertama yang datang ke Sumba di Tanjung Sesar. Leluhur ini juga merupakan hakim yang mengadili mereka yang menyimpang dari adat istiadat. Ketaatan kepada tata-tertib dijalankan dengan cara menjaga kesetiaan melaksanakan ritual korban dan berupaya menyenangkan para Marapu dengan korban-korban secara berkala sehingga para Marapu tidak murka.

Selain percaya pada Marapu, orang Sumba percaya pula kepada Sang Khalik. Manusia tidak dapat berhubungan langsung dengan Sang Khalik, melainkan harus melalui para Marapu sesuai dengan fungsinya. Misalnya jika terjadi musim kemarau yang panjang dan lahan pertanian menjadi kering, manusia membutuhkan hujan. Oleh karena itu yang disembah adalah, atau pelaksanaan ritual ditujukan kepada, Marapu Hujan agar menyampikannya pada Sang Khalik. Ritual selalu dalam bentuk korban hewan, yang dipimpin oleh seorang atau beberapa orang *Rato* (Imam). Sang Khalik tidak diketahui dan tidak boleh disebut namanya, Ia begitu suci dan keramat, karena itu manusia hanya boleh menyapa gelarnya, seperti: *Mori* (Tuhan), *Ama a Mawolo-Ina a Marawi* (Bapak yang memintal dan Ibu yang menenun), *Ndapanuma Ngara-Ndapateki Tamo* (Tak diucapkan nama-Tak disebut gelar); *Ina Kalada-Ama Kalada* (Ibu Besar dan Bapa Besar); *Ama nduka ama-Ina nduka ina* (Bapa segala bapa-Ibu segala ibu). Kepercayaan kepada Marapu sebagai pengantara manusia dengan Sang Khalik mendapat kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan orang Sumba. Karena dengan setia menjalani segala ritual dan tata tertib berarti menjaga keseimbangan dalam alam ini dan jika keseimbangan tetap terpelihara maka manusia akan bahagia dan selamat, terhindar dari goncangan dan malapetaka.

Pada prinsipnya penganut Marapu percaya kepada satu illah yang menciptakan mereka dan alam ini. Tetapi illah itu begitu tinggi, mulia, terhormat sehingga manusia tidak dapat berhubungan langsung dengannya. Manusia tidak boleh menyebut namanya (namanya tidak diketahui) tetapi hanya dengan gelar-gelarnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berhubungan dengan roh-roh para Leluhur yang telah meninggal. Dari para leluhur ini semua permohonan manusia akan disampaikan pada Yang Ilahi.

Penduduk asli Sumba masih hidup dalam kepercayaan Marapu ini, walaupun sudah banyak yang menjadi Kristen (Protestan dan Katolik) serta Muslim dalam beberapa generasi. Penganut Kepercayaan Marapu masih cukup banyak di Sumba.

KEPERCAYAAN MARAPU: BUDAYA ATAU AGAMA?

Di negara ini **agama lokal** (agama suku) tidak dikategorikan sebagai **agama**, oleh karena itu dalam catatan statistik pemerintah, agama lokal di Sumba

regular sacrifice to ward off the wrath of the Marapu.

In addition to their belief to Marapu, Sumbanese also believe in *The Creator*. Human beings cannot communicate directly with the Creator; instead, they have to go through the Marapu according to their functions. For example, when a dry season lasts too long and farmlands become dry, mankind needs rain. Thus, the one worshipped is, or the rites are aimed for, the Rain Marapu to talk to the Creator. The rites are always in the form of animal sacrifice, led by one or a number of *Rato* (Imam). The Creator is unknown and His name cannot be said, He is so sacred and holy that human beings can only speak of his titles, such as: *Mori* (God), *Ama a Mawolo-Ina a Marawi* (The spinning Father and the weaving Mother), *Ndapanuma Ngara-Ndapateki Tamo* (No name mentioned No title said); *Ina Kalada-Ama Kalada* (The Great Mother and the Great Father); *Ama nduka ama-Ina nduka ina* (Father of all fathers Mother of all mothers). Belief to the Marapu as the mediator between human beings and the Creator has a vital position in the life of the Sumbanese, as when people faithfully follow all rites and rules, it means maintaining the balance of the universe and if the balance is maintained, human beings will be happy and safe, protected from distress and catastrophe.

In principal, adherents to Marapu believe in one god creating themselves and the universe. However, this god is so high, noble, and respected that human beings cannot communicate directly with him. Human beings are not to call his name (name unknown), only his titles. In daily life, human beings always communicate with spirits of their ancestors that have long passed away. From these ancestors, all hopes of human beings will be conveyed to the Divine one.

Native Sumbanese still live with this Marapu belief, despite the fact that many have converted to Christianity (Protestantism as well as Catholicism) and Muslims in the last few generations. There are still quite many adherents of Marapu in Sumba.

Marapu Belief: Culture or Religion?

In this country, **indigenous religions** (tribal religions) are not categorized as **religions**, and therefore, in the demographic data of the government, indigenous religion in Sumba (Marapu) is categorized under the (religious) column "others". As the state manages life of religions, those recognized as religions are only Christianity, Islam, Hinduism, and Buddhism. When Gus Dur was president, Confucianism was also recognized as a religion, so that these six religions are referred to as "official religions". In statistics / demographic books, for example of West Sumba, there is no column for adherents of other faiths, what is written is a column of "others".

The government does not recognize indigenous or tribal religions as official religions, so that the whole rituals carried out are understood as a cultural behavior. Meanwhile, the adherents of Marapu often actualize

(Marapu) dimasukkan dalam kolom "lain-lain/ the others". Karena negara yang mengatur kehidupan beragama, maka yang diakui sebagai agama hanyalah Kristen, Islam, Hindhu dan Budha. Ketika Gus Dur menjadi presiden, Kong Hu Chu juga diakui sebagai agama, sehingga enam agama ini disebut "agama-agama resmi". Dalam buku statistik, misalnya Sumba Barat Dalam Angka, tidak ada kolom untuk penganut aliran kepercayaan, yang tertulis kolom "lain-lain".

Pemerintah tidak mengakui agama lokal sebagai agama resmi, sehingga seluruh ritual yang dilaksanakan oleh mereka dipahami sebagai perilaku budaya. Sedangkan penganut Marapu sendiri mengaktualisasikan diri sebagai penganut agama Marapu. Mereka mengaku bahwa agama mereka adalah Marapu. Mereka lebih "berani" mengaku sebagai penganut Marapu ketika tumbanganya rezim Orde Baru di negeri ini. Walaupun sebenarnya hak atas kebebasan menganut agama dan kepercayaan adalah bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak asasi dari kelompok hak-hak sipil dan politik. Hak tersebut dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak-hak tersebut lebih khusus dimuat dalam pasal 28 E dan Pasal 29 UUD 1945. Sehingga jika kita memahami hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan maka yang dijamin oleh hukum hak asasi manusia bukan saja kebebasan setiap orang untuk menganut suatu agama atau keyakinan tetapi termasuk juga unsur-unsur dari hak itu. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimanakah peran negara dalam pemenuhan hak asasi tersebut, yakni Hak atas kebebasan menganut agama dan kepercayaan? Sejauh manakah negara campur tangan dalam pemenuhan hak tersebut? Campur tangan negara dalam pelaksanaan hak-hak tersebut hendaknya tidak merugikan hak yang dimiliki orang lain sehingga pelaksanaan hak tersebut tidak mengancam keamanan atau ketertiban umum.

Tetapi dalam perjalanan sejarah bangsa ini, pemahaman pemerintah bahwa Marapu merupakan perilaku budaya saja, jelas terlihat ketika ritual-ritual Marapu dipromosikan sebagai aset Pariwisata. Apalagi ketika Kebudayaan terpisah dari Dinas Pendidikan dan bergabung dengan Dinas Pariwisata. Dengan demikian unsur-unsur budaya daerah merupakan aset wisata yang kemudian "dijual" kepada wisatawan. Di sini religiusitas dari ritual-ritual Marapu yang seharusnya berada pada ruang privat menjadi atraksi budaya yang ditampilkan di ruang publik untuk konsumsi para wisatawan. Karena harus dijual maka pengemasannya harus sesuai dengan keinginan konsumen. Di sini terjadi negosiasi antara *barang* (budaya dan manusianya), *broker* (pariwisata) dan *pembeli* (wisatawan). Sumba Barat sangat kaya dengan pariwisata budaya/etnik, yang mempunyai hubungan erat dengan kepercayaan Marapu. Dapat dikatakan bahwa ritus-ritus Marapu dikategorikan sebagai pariwisata budaya. Dinas Pariwisata mempunyai otoritas penuh dalam meng-

themselves as adherents of the Marapu religion. They acknowledge that their religion is Marapu. They were more "brave" to identify themselves as adherents of Marapu when the New Order era fell in the country, even though the right for freedom of religion and faith is a part of the human right, especially of civilian and political right groups. These rights are guaranteed by the Basic Constitution of 1945 (UUD 1945). They are more specifically included in articles 28 E and 29 UUD 1945, so if we understand the rights for freedom of religion and faith, what is guaranteed by the legislations protecting human rights is not merely freedom of religions or faith, but also the elements of the rights. The questions remaining are: what is the role of the state in the fulfillment of the human right, i.e. freedom of religion and faith? How far does the state intervene in the fulfillment of this right? State's interference in the practice of these rights should not cause any loss to the rights of others, meaning that the exercise of the rights ought not threat public safety or order.

However, in the historical journey of this very nation, the understanding of the government that Marapu is only a cultural behavior is clearly demonstrated when Marapu rituals are promoted as assets of tourism, moreover when cultural affairs are separated from Department of Education and attached to Department of Tourism. Thus, regional cultural elements serve as tourism assets which are then "sold" to tourists. Here, the religiosity and rituals of the Marapu which should have lied on the private sphere become a cultural attraction presented at the public sphere for the consumption of tourists. As it has to be sold, the packaging should be in line with consumers' wish. Here negotiation between the *goods* (the culture and human beings), *broker* (tourism) and *buyers* (tourists) occur. West Sumba is very rich of cultural/ethnic tourism, which is closely related to Marapu belief. It could be said that Marapu sites are categorized as cultural tourism. The Department of Tourism has full authority over classification of Sumbanese culture and Marapu rites as a tourist object, for example on the status of kampongs. In the Master Plan for Development of Regional Tourism Development for West Sumba year 2004-2014, Tourism Service classified the status of kampongs with the term Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP/ Tourism Development Area). It is mentioned that there are three status for the kampongs, namely *developed*, *developing*, and *potential*. With this classification carried out by the government, there has been "jealousy" from inhabitants of other kampongs with 'developing' status.

The intensity of the government in developing cultural tourism in Sumba is one form of cultural preservations. This is what has always been stated by the government, and the government is not in the process of preserving Marapu belief. However, adherents of Marapu belief understand that all cultural attractions presented do not stand independently, meaning that it has to be initiated with Marapu rituals. In this case, to arrive at the cultural attractions which are consumption of tourists, it

klasifikasikan kebudayaan Sumba dan ritus-ritus Marapu sebagai obyek wisata, misalnya tentang status kampung-kampung. Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2004-2014, Dinas Pariwisata mengklasifikasikan status kampung-kampung dengan istilah Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP). Disebutkan ada tiga status dari kampung-kampung tersebut yakni, *berkembang, sedang berkembang dan potensial*. Dengan pengklasifikasian yang dilakukan pemerintah maka terjadi “kecemburuan” dari penghuni kampung-kampung yang lain terhadap kampung-kampung yang berstatus ‘berkembang’.

Intens-nya pemerintah mengembangkan pariwisata budaya di Sumba merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya. Ini yang selalu dikatakan oleh pemerintah, dan pemerintah tidak sedang melestarikan kepercayaan Marapu. Tetapi penganut Marapu memahami bahwa semua atraksi budaya yang ditampilkan tidak berdiri sendiri, artinya harus didahului dengan ritual Marapu. Sehingga untuk tiba pada atraksi budaya yang merupakan konsumsi wisatawan, semestinya terlebih dahulu diawali dengan ritual-ritual dan waktu serta tempat yang telah ditetapkan oleh penganut Marapu. Pernah terjadi satu ritual Marapu (Pasola) dilaksanakan oleh pemerintah di luar waktu yang biasa terjadi dan tanpa diawali dengan ritual, yang oleh pemerintah dikatakan “Pasola Wisata”. Hal ini menuai protes besar dari para pemimpin agama Marapu.

Semua yang dikemukakan di atas hendak mengatakan bahwa di satu sisi pemerintah “membutuhkan” penganut Marapu dalam arti atraksi budaya mereka sebagai aset pariwisata untuk dijual. Hasil jualan ini akan masuk dalam salah satu pendapatan asli daerah. Di sisi lain penganut Marapu tidak diakui sebagai satu komunitas agama. Memang tidak mudah bagi pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk mengakui Marapu sebagai penganut aliran kepercayaan apalagi agama. Ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di negeri ini. Misalnya dalam undang-undang Administrasi dan Kependudukan (yang sudah disahkan pada 8 Desember 2006), yang isinya penuh dengan diskriminasi dan melanggengkan label “agama resmi dan tidak resmi”. Sehingga masyarakat yang tidak menganut salah satu dari agama resmi yang difasilitasi oleh negara termarjinalkan.

Konsekuensi pelabelan tersebut telah berimplikasi pada pengabaian hak-hak sipil dan politik dari mereka, sehingga sulit bagi mereka (penganut Marapu), dalam mengakses masalah pencatatan kependudukan. Mereka tidak leluasa mengisi kolom agama sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Kesulitan ini dapat berimplikasi pada hak pencatatan pernikahan, kelahiran serta urusan hak sipil dan politik lainnya. Realitasnya, jika masyarakat ingin memperoleh kemudahan dalam layanan sipil tersebut, mereka harus menempuh cara “terpaksa-dipaksa-berpura-pura”

**Mereka tidak leluasa
Mengisi kolom agama
sesuai dengan keyakinan
yang mereka anut.
Kesulitan ini dapat berimplikasi
pada hak pencatatan pernikahan,
kelahiran serta urusan hak sipil
dan hak politik lainnya**

should have been initiated with rituals and time as well as venue determined by followers of Marapu belief. There was one Marapu ritual (Pasola) carried out by the government outside of the time when it commonly occurs and without being initiated by any rituals, which the government refers to as “Pasola Wisata”. This triggered a big protest from leaders of Marapu religion.

The aforementioned statements would actually pronounce that on one side, the government “needs” adherents of Marapu belief in terms of their cultural attractions as assets of tourism to be sold. The product of this trade will be included as one of local incomes. On the other side, adherents of the Marapu belief are not recognized as a religious community. It is indeed not easy for the government of West Sumba district to recognize followers Marapu as adherents of a belief, moreover a religion. This is related to the legislations in this country. Take as an example the Law on Population Administration (already passed on 8 December 2006), which content is full of discrimination and which conserve the labels “official and unofficial religions”. As a consequence, the citizens not embracing one of the official religions recognized by the state are marginalized.

The labeling has implied on ignorance of Marapu adherents’ civil and political rights, so that it is difficult for them to access public administration services. They do not have the freedom to fill out the column of religion in accordance with the faith they embrace. This difficulty can also affect their rights for marriage and birth registry, as well as other civil and political rights. In reality, if members of community would like to gain easy access to the aforementioned civil service, they have to be “coerced to pretend” that they recognize or subscribe to one of the six official religions. If this is what happens to the adherents of Marapu belief, then of course it is already against the Constitution (UUD) 1945, as the right for freedom of religion and faith is a constitutional right.

Perhaps the main issue lies on the definition and requirements of religions determined by the government: that a religion has to have a Holy Scripture, a prophet, etc. If these are the requirements for a faith to be registered to

mengakui atau menganut salah satu dari enam agama resmi tersebut. Jika ini yang terjadi pada penganut Marapu maka tentu itu sudah bententangan dengan UUD 1945. Karena hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak konstitusional.

Mungkin pokok masalahnya terletak pada definisi dan persyaratan agama yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa agama harus memiliki kitab, harus mempunyai nabi dan sebagainya. Jika itu yang menjadi persyaratan untuk didaftarkan pada Departemen Agama maka tentu Marapu tidak dapat dikatakan agama, demikian pula dengan agama-agama lokal lainnya. Pertanyaannya, apa itu agama? Jika agama dimengerti seperti yang dirumuskan oleh pemerintah maka tentu penganut Marapu akan mengalami kesulitan. Tetapi jika penganut Marapu adalah komunitas yang termasuk dalam apa yang dalam pasal 28E dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945, yang disebut sebagai penganut 'kepercayaan', maka tentu mereka mempunyai hak yang sama dengan penganut agama lainnya di negara ini.

PENGANUT MARAPU: RIWAYAT-MU KINI

Saya pernah melakukan perjalanan dengan pesawat terbang dari Sumba ke Jakarta bersama dengan ibu Ina (nama samaran) dan seorang bapak Ama (nama samaran) penganut Marapu. Kami transit di salah satu bandara sebelum ke Jakarta dan sebelum naik pesawat kami harus 'check in', dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Saya menyerahkan KTP kami bertiga kepada petugas. Setelah menerima KTP kami, petugas bertanya kepada saya mengapa di KTP ibu Ina pada kolom agama tidak tertulis agama apapun, di-strip datar saja dan di KTP bapak Ama pada kolom agama ditulis 'lain-lain'. Ketika itu baru saya juga mengetahuinya. Memang petugas tidak mempersoalkannya tetapi ia merasa 'aneh' katanya. Pada kesempatan itu saya bertanya pada bapak Ama dan Ibu Ina, mengapa demikian. Ibu Ina menjelaskan ketika mengurus KTP beliau hendak dicatat beragama kristen dalam kolom agama tetapi beliau menolak dengan alasan belum pernah menyatakan diri (dan dibaptis) sebagai penganut agama kristen. Beliau minta agar di kolom agama ditulis Marapu tetapi petugas Dinas Kependudukan menjawab bahwa Marapu bukan agama, sehingga kolom agama tidak ditulis apapun. Sedangkan untuk bapak Ama di KTP-nya pada kolom agama ditulis :*lain-lain*. Ini sesuai dengan kolom yang terdapat dalam buku statistik (Sumba Barat Dalam Angka) yang dikeluarkan pemerintah. Dalam buku tersebut penganut Marapu dicatat dalam kolom *lain-lain/others*. Demikian pula dalam hal pendidikan, anak-anak penganut Marapu selalu diminta akte kelahiran ketika mendaftarkan diri di sekolah-sekolah. Mereka tidak memiliki akte kelahiran karena pernikahan orang tua mereka tidak tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil. Orang tua mereka harus

the Department of Religious Affairs, then of course Marapu cannot be referred to as a religion, as the case applies to other indigenous religions. The question is: what is a religion? If religion is understood as what has been formulated by the government, then of course adherents of Marapu will find difficulties. However, if adherents of Marapu are included in the community stated in article 28E and article 29 verse 2 UUD 1945, which are referred to as adherents of 'a belief', then of course they ought to have equal rights with other followers of religions in this country.

MARAPU ADHERENTS: YOUR FATE TODAY

I was on a trip with an airline from Sumba to Jakarta with ibu Ina (an alias) and bapak Ama (alias), adherents of Marapu. We transited at one airport on the way to Jakarta and before boarding again, we had to 'check in' by handing over our ID cards (KTP). I handed over the ID cards of us three to the officer on duty. After receiving our ID cards, the officer asked me why in the ID card of ibu Ina there was nothing written under the religion column, just a hyphen (-) and in the ID card of pak Ama, the religion column is filled out with 'others'. That was the first time I found out about it as well. The officers did not make an issue out of it, but he felt it was 'weird', as he put it. At this opportunity I asked bapak Ama and Ibu Ina why it was so. Ibu Ina explained that when she registered for her ID card, she was to be registered as a Christian in the religion column, but she declined with justification that she had never identified herself (and being baptized) as a Christian. She requested Marapu to be written in the religion column of her ID card, but the officer at the Public Administration Service responded that Marapu is not a religion. As a result, there was nothing written in the religion column. Whereas for bapak Ama, in his ID card, the religion column is filled out with: *others*. This is in line with the column in the statistics book

mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap warga negara (bukan saja hak setiap penganut agama resmi) yang dijamin dalam UUD 1945

menikah dengan cara pernikahan salah satu dari enam agama resmi yang ditetapkan pemerintah. Hal ini pernah penulis konfirmasi kepada pihak sekolah dan para guru mengatakan bahwa itu musti dilakukan karena dalam kurikulum sekolah ada pelajaran agama yang juga sesuai dengan agama resmi tersebut. Sehingga jika mereka menganut agama Marapu maka tidak ada nilai untuk pelajaran agama karena Marapu bukan agama. Guru-guru juga tidak dapat berbuat lain, karena anak-anak penganut Marapu 'terpaksa' dicatat menganut salah satu agama resmi. Orang tua yang menginginkan anak-anaknya dapat bersekolah 'terpaksa' menerima usul dari pihak sekolah. Tetapi ada pula orang tua yang tidak menerima usul seperti ini sehingga anak-anak mereka tidak dapat sekolah. Mereka tidak mengetahui bahwa mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap warga negara (bukan saja hak setiap penganut agama resmi) yang dijamin dalam UUD 1945. Tugas negara memberikan pendidikan pada setiap warga negara, karena itu pula Undang-undang Badan Hukum Pendidikan sudah 'digugurkan', karena tidak sesuai dengan UUD 1945. Jika penganut Marapu tidak mendapatkan pendidikan maka akan berdampak pada 'ketertinggalan' dalam banyak hal, seperti akses ekonomi dan 'buta' hukum.

Dengan temuan-temuan seperti ini jelas terlihat bahwa penganut Marapu masih mengalami kesulitan dalam hak-hak sipil dan politik mereka. Tentu ini merupakan pekerjaan rumah kita bersama yang sangat peduli pada hak asasi manusia di negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Beding. B. Michael dan Sri Indah Lestari Beding, (2003), *Ringkiknya Sandel Harumnya Cendana*, PEMDA Kabupaten Sumba Timur.
- Kapita, Oe.H, (1976), *Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya*, BPK Gunung Mulia
- Tunngul, Nggodu. (2003), *Etika dan Moralitas dalam Budaya Sumba*, Pro Millenio Center, Bappeda Kabupaten Sumba Timur.
- Wellem, F.D., (2004), *Injil Dan Marapu*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Yewangoe,A.A. (1980), "Korban Dalam Agama Marapu", *Peninjau* Majalah LITBANG PGI Tahun VIII No. 4, Jakarta.

(West Sumba in Numbers) published by the government. In this book, adherents of Marapu belief was recorded in the column *others*. There is also an issue with education, as the children of the adherents of Marapu was always asked for their birth certificate when they are registered at schools. They do not possess any birth certificate as the marriage of their parents are not registered at the office of the Civil Registry. Their parents have to be married under one of the official religions established by the government to obtain their marriage certificate. It was confirmed by the writer once to the school and the teachers said it must be done as in the school curriculum there is a subject on religion which only teaches official religions recognized by the government. As a consequence, for adherents of Marapu belief, there is no grade given for the subject of religion, as Marapu is not one. Teachers cannot do otherwise as well, as children of the adherents of Marapu 'have to' be registered under one of official religions. The parents who would like to send their children to school 'have to' accept the proposal of the school. However, there are some parents who would not accept such suggestion. As a consequence, their children cannot go to school. They are not aware that education is the right of all citizens (not only the rights of adherents of official religions) guaranteed in UUD 1945. The task of the state is to provide education to every citizen, thus the Law on Education Firm was 'annulled', as it is not in line with UUD 1945. If adherents of Marapu do not gain access to education, it will also result in 'underdevelopment' in many spheres, such as economic access and legal 'blindness'.

With above findings, it could be clearly perceived that the adherents of Marapu still experience difficulties in civil and political rights. It is of course the homework for those of us who really care about human right practices in the country.

BIBLIOGRAPHY

- Beding. B. Michael dan Sri Indah Lestari Beding, (2003), *Ringkiknya Sandel Harumnya Cendana*, LOCAL GOVERNMENT of East Sumba district.
- Kapita, Oe.H, (1976), *Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya*, BPK Gunung Mulia
- Tunngul, Nggodu. (2003), *Etika dan Moralitas dalam Budaya Sumba*, Pro Millenio Center, Bappeda East Sumba district.
- Wellem, F.D., (2004), *Injil Dan Marapu*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Yewangoe,A.A. (1980), "Korban Dalam Agama Marapu", *Reviewer of LITBANG PGI Magazine Year VIII No. 4*, Jakarta



BAHA'I FAITH: KEESAAN TUHAN, KESATUAN AGAMA DAN KESATUAN UMAT MANUSIA

Oleh Ira Sasmita

*"Tujuan dasar yang menjiwai Keyakinan dan Agama Tuhan ialah untuk melindungi kepentingan kepentingan umat manusia dan memajukan kesatuan umat manusia, serta untuk memupuk semangat cinta kasih dan persahabatan di antara manusia."
(Baha'ullah)*

Tidak banyak di antara kita yang mengenal agama ini. Di Indonesia, agama yang diakui Negara hanya 6 (Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, Islam dan Konghucu). Ini membuat sebagian besar masyarakat Indonesia menutup mata terhadap keberadaan kepercayaan dan agama-agama yang lain, yang jumlahnya jauh lebih banyak, salah satunya adalah agama Baha'i. Agama Baha'i sendiri

BAHA'I FAITH: THE ONENESS OF GOD, THE ONENESS OF RELIGION, AND THE ONENESS OF HUMAN FAMILY

By Ira Sasmita

*"The basic objective living the Faith and Religion of God is to protect interests of mankind, advance the unification of mankind, and cultivate a spirit of love and friendship among human beings."
(Baha'ullah)*

There are not many of us who are on familiar terms with this religion. In Indonesia, there are only 6 (six) religions recognized by the State (Protestantism, Catholicism, Buddhism, Hinduism, Islam, and Confucianism). This makes majority of Indonesian community close their eyes to the existence of other religions and faiths, which are of a bigger number, one of which being Baha'i faith. Baha'i faith has long existed in Indonesia, since Indonesia became of the centers of global trade. Today, there are thousands of Baha'i

sudah lama hadir di Indonesia, yaitu sejak Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan dunia. Saat ini, ada sekitar ribuan umat Baha'i tersebar di seluruh Indonesia dan mereka sudah memiliki kantor pusat di Jakarta.

Tulisan ini akan menjelaskan sedikit tentang ajaran agama Baha'i, sejarah dan perkembangannya serta problematika yang dihadapi masyarakat Baha'i Indonesia dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tulisan ini merupakan rangkuman wawancara penulis dengan beberapa orang teman Baha'i di Bandung dan didukung oleh beberapa referensi.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BAHAI FAITH

Pendiri agama ini dikenal dengan nama Baha'ullah (dalam Bahasa Arab artinya "Kemuliaan Allah"). Nama aslinya adalah Mirza Husayn 'Ali, salah seorang bangsawan Iran, yang mengumumkan misinya sebagai pesuruh Tuhan pada tahun 1863, di sebuah taman yang kemudian dinamai dengan Taman Ridwan (Bagdad).

Sebelum berbicara banyak tentang Baha'ullah dan misi keagamaannya, penulis akan membicarakan terlebih dulu tokoh penting, pembuka jalan bagi misi Baha'ullah, yaitu Sayyid 'Ali Muhammad dari Shiraz, Iran. Pada tanggal 23 Mei 1844, Sayyid 'Ali Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun, mengumumkan bahwa dia adalah pembawa amanat baru Tuhan yang ditakdirkan untuk mengubah kehidupan spiritual umat manusia. Konsep ajarannya berbeda dengan konteks masyarakat ketika itu. Ia mengajarkan pembaharuan spiritual dan kemajuan kehidupan sosial dengan berdasarkan pada cinta dan kasih sayang, bukan kekuatan dan kekerasan. Misi dakwahnya memunculkan harapan besar dan dengan cepat mampu menarik ribuan pengikut.

Sayyid 'Ali Muhammad menggunakan nama *Sang Bab*, yang dalam Bahasa Arab artinya "Pintu" atau "Gerbang", yang bermakna bahwa dia dipersiapkan oleh Tuhan bagi kedatangan "Dia Yang akan Tuhan Wujudkan" (*Him Whom God will make manifest*), membuka jalan bagi wahyu yang lebih besar lagi. *Sang Bab* mengungkapkan "*Tujuan yang mendasari wahyu ini, sebagai sesuatu yang mendahului, adalah untuk memberitahu kedatangan Ajaran Dia yang akan Tuhan Wujudkan*".

Agama *Sang Bab* tumbuh dengan pesat di semua kalangan di Iran, namun juga mendapat perlawanan keras dari pemerintah dan para pemimpin agama. Ia dipenjarakan di benteng Máh-Kú (pegunungan Azerbaijan), lalu dipindahkan ke penjara benteng Chihriq. Karena pengaruh yang luar biasa meskipun telah dipenjarakan di dua tempat ini, *Sang Bab* kemudian dieksekusi pada tanggal 9 Juli 1950 di kota Tabriz. Jenazahnya kemudian diambil oleh para pengikutnya

community spread all over Indonesia with their headquarter in Jakarta.

This writing will explicate a little about the teachings of Baha'i faith, its history, development, and problems faced by Indonesian Baha'i community within the context of life in the nation and country. This writing is a summary of the writer's interview with some of our Baha'i friends in Bandung supported with a number of references.

THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF BAHAI FAITH

The founder of this faith was well known by the name of Baha'ullah (in Arabic it means "The Glory of God"). His real name was Mirza Husayn 'Ali, one of Iranian noblemen announcing his mission as God's messenger in 1863, at a garden then named the Garden of Ridwan (Baghdad).

Before discussing more about Baha'ullah and his religious mission, the writer will discuss first an important figure, the one who opened the way for Baha'ullah mission, namely Sayyid 'Ali Muhammad of Shiraz, Iran. On 23 May 1844, Sayyid 'Ali Muhammad who was then 25 years old, announced that he was a new messenger of God destined to alter the spiritual life of human kind. The concept of his teaching is different from the context of community of the time. He taught spiritual restitution and advancement of social life based on affection, not power and violence. His mission brought about a great hope and promptly withdrew thousands of followers.

Sayyid 'Ali Muhammad used the name *The Bab*, which in Arabic means "the Door" or "Gate", which means he was prepared by God for the coming of "Him Whom God will make manifest", to open the way for a greater revelation. *The Bab* said "*The purpose underlying this Revelation, as well as those that preceded it, has, in like manner, been to announce the advent of the Faith of Him Whom God will make manifest.*"

The faith of *The Bab* grew fast in all circles in Iran, yet also received strong resistance from the government and religious leaders. He was put into prison at fort Máh-Kú (Azerbaijan mountains), and then transferred to the prison of fort Chihriq. Due to his immense influence, even though he had been imprisoned in these two places, *The Bab* was then executed on 9 July 1950 at the city of Tabriz. His body was then taken by his followers quietly, and then brought from Iran to Karmel Hill (Israel). At this time, there were tens of thousands of the followers of the *Bab* who were captured, tortured, and even assassinated. One of those imprisoned was Mirza Husayn Ali.

Mirza Husayn Ali was the main follower of *The Bab*. In 1852, when imprisoned at the dungeon of Siyáh-Chál (Teheran), he received the first revelation explaining that he was "Him Whom God will make manifest", as

secara diam-diam, dan dibawa dari Iran menuju Bukit Karmel (Israel). Pada masa ini, ada puluhan ribu pengikut *Sang Bab* ditangkap, dianiaya dan bahkan dibunuh. Salah satu yang ditahan adalah Mirza Husayn Ali.

Mirza Husayn Ali merupakan pendukung utama *Sang Bab*. Pada tahun 1852, ketika ditahan di penjara bawah tanah Siyáh-Chál (Teheran), dia menerima wahyu pertama yang menjelaskan bahwa dia adalah "Dia yang akan Tuhan Wujudkan", sebagaimana yang diramalkan oleh *Sang Bab*. Ketika itu, ia belum mengumumkan misinya kepada para penganut agama *Sang Bab*. Begitu dibebaskan, ia diasingkan ke Bagdad (Irak). Di sana, Mirza Husayn Ali mulai mendidik umat melalui tulisan-tulisan suci dan keteladanannya, hingga pada tahun 1863, Mirza Husayn Ali mengumumkan misinya kepada para pengikut *Sang Bab* yang berada di Bagdad dan sejak itu dikenal sebagai agama Bahá'í. Dia sendiri kemudian mengganti namanya dengan Baha'ullah.

Setelah pengumuman kerasulannya, oleh pemerintahan Turki, Baha'ullah dipindahkan ke Konstantinopel (Istambul), dan dari sana ke kota Adrianopel (Edirne). Di Adrianopel Baha'ullah mulai mengirimkan "Loh-loh" kepada berbagai raja dan pemimpin dunia, yang mengumumkan kepada mereka kedatangan Hari Tuhan dan menyerukan agar mereka berdamai. Pada tahun 1868, Baha'ullah diasingkan ke kota 'Akká (Israel). Beliau wafat pada tahun 1892 di Bahjí dekat 'Akká, tempat yang kemudian menjadi Qiblat agama Bahá'í. Sebelum wafat, dalam *Kitáb-i-'Ahd*, Baha'ullah telah menunjuk putranya, 'Abdu'l-Baha' sebagai pemimpin agamanya dan Penafsir sah atas Tulisan-Tulisan Suci.

Abdul Baha' sendiri lahir pada 23 Mei 1844 (bertepatan dengan *Sang Bab* mengumumkan misinya sebagai pesuruh Tuhan) dan sejak usia 8 tahun dia sudah mendampingi Baha'ullah selama masa pengasingan dan pemenjaraan yang panjang. Ia dibebaskan sebagai akibat dari "Revolusi Pemuda Turki" (pada tahun 1908). Lalu sepanjang tahun 1910-1913 (sumber lain 1911), Abdul Baha' melakukan perjalanan ke Mesir, Inggris, Skotlandia, Perancis, Amerika Serikat, Jerman, Austria, dan Hungaria, di mana dia mengumumkan prinsip-prinsip ajaran Baha'i kepada para jamaah semua agama, berbagai organisasi pendukung perdamaian, para pengajar di universitas-universitas, para wartawan, pejabat pemerintah, serta khalayak umum lainnya. Ia wafat di Haifa pada tahun 1921, dan dikuburkan di salah satu ruang dari Makam *Sang Bab*.

Sebelum wafat, Abdul Baha' menulis dalam surat wasiatnya bahwa ia menunjuk cucunya, Shoghi Effendi sebagai "Wali Agama". Selama masa hidupnya, Shoghi Effendi menerjemahkan banyak Tulisan Suci Baha'ullah dan 'Abdu'l-Baha' ke dalam Bahasa Inggris dan menjelaskan makna dari Tulisan-tulisan suci. Di samping itu, ia juga melaksanakan berbagai rencana

foretold by *The Bab*. At that time, he was yet to declare his mission to the followers of *The Bab's* faith. Once freed, he was isolated to Bagdad (Iraq). There, Mirza Husayn Ali commenced educating the congregation through sacred scriptures and his examples, until year 1863, when Mirza Husayn Ali proclaimed his mission to the followers of *The Bab* who were in Bagdad and since then, the faith was known as Bahá'í faith. He himself then changed his name to Baha'ullah.

After the announcement of his prophethood by the Turk government, Baha'ullah was then transferred to Konstantinopel (Istambul), and from then to the city of Adrianopel (Edirne). In Adrianopel, Baha'ullah started writing "tablets" to kings and leaders of the world, which spoke of the dawn of the New Age and urged for establishment of lasting peace. In 1868, Baha'ullah was exiled to the city of 'Akká (Israel). He passed away in 1892 in Bahjí near by 'Akká, a place which was then made as the *Qibla* of Bahá'í faith. Before passing away, in *Kitáb-i-'Ahd*, Baha'ullah had appointed his son, 'Abdu'l-Baha' as leader of his faith and authorized interpreter of his Sacred Scriptures.

Abdul Baha' himself was born 23 May 1844 (the same day when *The Bab* proclaimed his mission as messenger of God) and since 8 years of age, he already stood by the side of Baha'ullah during long period of isolation and imprisonment. He was released as a consequence of the "Young Turk Revolution" (in 1908). Then during 1910-1913 (another reference states 1911), Abdul Baha' traveled to Egypt, United Kingdom, Scotland, France, United States, Germany, Austria, and Hungary, where he proclaimed the principles of Baha'i teachings to congregations of all religions, numerous organizations supporting peace, lecturers at universities, journalists, government officials, and other public. He passed away in Haifa in 1921, and was buried in one of the room in the crypts of *The Bab*.

Before passing away, Abdul Baha' wrote in his testament that he appointed his grandson, Shoghi Effendi, as "Guardian of the Faith". During his lifetime, Shoghi Effendi translated a lot of Baha'ullah's and 'Abdu'l-Baha's Holy Writings into English and elucidate the meaning of the Sacred Scriptures. In addition, he also



Kamar dimana Bahaulah wafat

global untuk pengembangan masyarakat Baha'i, melakukan surat-menyurat dengan umat Baha'i di seluruh dunia dan membangun struktur administrasi untuk mempersiapkan terbentuknya lembaga Baha'i Internasional berdasarkan apa yang ditetapkan dalam Tulisan Suci Baha'ullah. Shoghi Effendi meninggal pada tahun 1957.

Lembaga Internasional yang dimaksud adalah Balai Keadilan Sedunia. Setelah wafatnya Shoghi Effendi, kepemimpinan umat Baha'i tidak lagi bersifat individu, melainkan bersifat kelembagaan yaitu Balai Keadilan Sedunia yang bertempat di Haifa (dekat makam Baha'ullah). Anggota Balai Keadilan Sedunia berjumlah 9 orang dan dipilih dalam 5 tahun. Pada tingkat negara, didirikan Majelis Nasional Baha'i dan di tingkat setempat (wilayah terkecil), didirikan Majelis Setempat Baha'i. Anggota majelis ini bermusyawarah dan membuat rencana demi kesejahteraan, pendidikan rohani dan perkembangan sosial masyarakat Baha'i, serta untuk meningkatkan kemajuan seluruh umat manusia.

Saat ini, agama Baha'i adalah agama kedua yang paling tersebar di dunia, setelah Kristen/Katolik, karena agama ini berada di lebih dari 120.000 tempat di seluruh dunia dan juga telah resmi diakui sebagai agama yang independen di lebih dari 235 negara dan wilayah teritorial. Berikut adalah data umat Baha'i dan jumlah Majelis Nasional serta Majelis Setempat di seluruh dunia:

Masyarakat Bahá'í telah ada di :	190 negara dan 45 wilayah otonom
Jumlah Majelis Nasional :	179
Jumlah Majelis Setempat :	15,798

Distribusi Geografis Majelis Setempat :

Asia	5.489
Amerika	4.050
Afrika	4.309
Eropa	998
Australia	952
Umat Bahá'í tersebar di :	126,904 kota/desa di seluruh dunia
Tulisan Suci Bahá'í telah diterjemahkan ke dalam	802 bahasa

Untuk hubungan internasional, masyarakat Baha'i membentuk Masyarakat Internasional Baha'i (Baha'i International Community). Sejak tahun 1948, lembaga ini diakui sebagai lembaga non-pemerintahan dalam Perserikatan Bangsa-bangsa. Pada tahun 1970, Masyarakat Internasional Baha'i memperoleh status resmi sebagai badan penasihat bagi ECOSOC (Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Bidang Sosial Ekonomi) dan bagi UNICEF (Dana Anak-Anak Internasional). Selain itu, Baha'i International Community juga bekerja sama dengan WHO (Organisasi Kesehatan Sedunia) dan UNEP (Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa). Ada beberapa kantor

carried out various global plans for development of the Baha'i community, did correspondence with Baha'i community all over the world and built an administrative structure to prepare for the establishment of an International Baha'i institution based on what was stipulated in the Holy Writings of Baha'ullah. Shoghi Effendi passed away in 1957.

The said International institute is Universal House of Justice. After the passing away of Shoghi Effendi, the leadership of Baha'i congregation was no longer of individual nature, but of institutional one, i.e. Universal House of Justice located in Haifa (near by the crypt of Baha'ullah). There are 9 (nine) members in the Universal House of Justice, elected once every 5 (five) years. At the country level, Baha'i National Spiritual Assembly are established and at the local level (smallest region), Local Spiritual Assembly are founded. Members of this Assembly meet to make a concord and make plans for welfare, spiritual education, and social development of Baha'i community, as well as to improve advancement of the whole mankind.

Today, Baha'i faith is the second-most widely spread independent religion in the world, after Christianity / Catholicism, as this faith exists in more than 120,000 regions all over the world and has also been formally recognized as an independent religion in more than 235 countries and territorial regions. The following table depicts the data of the Baha'i congregation and number of National Spiritual Assembly as well as Local Spiritual Assembly from all over the world:

Bahá'í community has existed in:	190 countries and 45 independent territories
Number of National Spiritual Assembly:	179
Number of Local Spiritual Assembly:	15,798

Geographical Distribution of the Local Spiritual Assembly:

Asia	5,489
America	4,050
Africa	4,309
Europe	998
Australia	952
Bahá'í community spread in:	126,904 cities / villages all over the world
Bahá'í Sacred Scripture has been translated in:	802 languages

For international relations, Baha'i community established the Baha'i International Community. Since 1948, this institution has been recognized as a Non-Government Organization in the United Nations. In year 1970, Baha'i International Community gained its official status as an advisory committee for ECOSOC (Economic

khusus dan perwakilan yang berlokasi di New York, Jenewa, Paris, Hong Kong, dan London.

Selain dengan lembaga PBB, Baha'i International Community juga bekerja sama dengan beberapa LSM internasional, antara lain menjadi anggota World Wide Fund For Nature's Network On Conservation and Religion, Centre for Our Common Future, World Conference on Religion and Peace, dan Advocates for African Food Security.

AJARAN BAHAI FAITH

Masyarakat Baha'i Faith berpegang pada Tulisan Suci Baha'ullah yang merupakan wahyu Tuhan, dan penafsiran-penafsiran Tulisan Suci dari Abdul Baha' dan Shoghi Effendi. Ada begitu banyak Tulisan Suci Baha'ullah, di antaranya *Kitab Tersembunyi*, *Tujuh Lembah*, *Kitab Al-Iqan (Kitab Keyakinan)*, *Kitab al-'Ahd*. Pada dasarnya ada tiga nilai dasar dan utama yang diajarkan oleh berbagai Tulisan Sucinya.

Pertama, percaya bahwa Tuhan itu Esa. Manusia sama sekali tidak bisa mengenal Hakikat Tuhan, kecuali memahami Sifat-Sifatnya melalui wahyu-Nya dan perwujudan Tuhan (Pesuruh Tuhan). Jika diberi perumpamaan, Tuhan adalah matahari dan Pesuruh Tuhan adalah sinar matahari yang sampai di bumi. Matahari tidak mungkin akan mendekati bumi, begitu pula bumi. Maka sinarlah yang mengenalkan manusia pada matahari. Oleh karena itu, Pesuruh Tuhan memiliki dua derajat, yaitu derajat kemanusiaan dan derajat Ilahi.

Kedua, semua agama yang dianut umat manusia pada dasarnya bersumber dari sumber yang sama dan menuju pada hakikat yang sama. Perbedaan konsep, hukum dan ritual merupakan hasil dari perbedaan kemampuan pemahaman manusia. Menurut agama ini, umat manusia mengalami evolusi pemahaman terhadap yang Ilahi. Jika diibaratkan dengan proses pendidikan seorang anak, semakin bertambah umurnya, pendidikan yang diberikan semakin berkembang, dimulai dari konsep yang sangat sederhana sampai pada konsep yang sangat kompleks. Tidak hanya karena kemampuan si anak yang juga semakin berkembang, tapi juga karena kebutuhannya semakin kompleks. Begitulah proses pendidikan Tuhan terhadap umatnya melalui Para Pesuruhnya, yaitu disesuaikan dengan kemampuan manusia dalam memahami Yang Ilahi dan kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupannya. Sehingga semua agama dunia ini sebenarnya adalah satu dan sama, yaitu bersumber dan menuju hakikat yang sama. Karena konsep seperti ini, Baha'ullah mendorong umatnya untuk bergaul dengan semua agama penuh persahabatan dan perdamaian. Wahyu dalam Tulisan Suci Baha'ullah menjelaskan sebagai berikut: *"Bergaullah dengan semua agama dalam persahabatan dan keselarasan, agar mereka dapat menghirup darimu keharuman*

and Social Council of the UN) and UNICEF (United Nations Children's Fund). In addition, Baha'i International Community also works together with WHO (World Health Organization) and UNEP (United Nations Environment Programme). This organization has numerous special offices and representatives based in New York, Geneva, Paris, Hong Kong, and London.

In addition to UN agencies, Baha'i International Community also works together with a number of International NGOs, among others by becoming a member of the World Wide Fund for Nature's Network On Conservation and Religion, Centre for Our Common Future, World Conference on Religion and Peace, and Advocates for African Food Security.

TEACHINGS OF BAHAI FAITH

Baha'i Faith congregation holds on to the Holy Writings of Baha'ullah which are God's revelation, as well as the interpretations of the Holy Writings of Abdul Baha' and Shoghi Effendi. There are so many Holy Writings of Baha'ullah, among others are *The Hidden Book*, *Seven Valleys*, *Kitab Al-Iqan (The Book of Faith)*, and *Kitab al-'Ahd*. In essence, there are three basic and core values taught by its various Holy Writings.

First, believe that God is One. Human beings cannot at all comprehend the Truth about God, except to understand His natures through His revelations and manifestation of God (God's messenger). As an analogy, God is the sun and God's messenger is the sunray that reaches the earth. It is impossible for the sun to come close to earth, and vice versa. Thus, it is the sunray that introduces human beings to the sun. Therefore, the messenger of God has twofold nature: the physical and the spiritual.

Second, all religions embraced by mankind principally come from one source towards the same truth. The differences in the concepts, laws, and rituals are the result of the capacity of comprehension of human beings. On the word of this religion, mankind experiences evolution in their comprehension of the divine one. If analogized with an educational process of a child, the older s/he gets, the more developed the education given, starting from a very simple concept to a very complex one. This is not merely due to a more developed capability the child has, but also due to his/her more complex needs. The educational process given by God to His people through His messengers is accordingly adjusted to the capability of the human being in comprehending the Divine One and the needs of the human being in living his/her life. In view of that, all religions in this world are essentially one and the same, sourced in and go towards the same truth. It is because of this concept that Baha'ullah encourages its congregation to befriend all religions with friendship and peace. The Revelation in the Holy Writings of Baha'ullah said: *"Make friends with all religions in fellowship and harmony, so they could smell from you the fragrance of God. Beware, do not let the fire*

Tuhan. Berhati-hatilah, jangan sampai api kebodohan menguasai dirimu di antara orang-orang. Segala sesuatu berasal dari Allah, dan kepada-Nya lah semua akan kembali. Ia sumber segala sesuatu dan semua berakhir kepada-Nya”.

Ketiga, karena Tuhan adalah Esa dan semua agama adalah satu, maka umat manusia sebenarnya adalah satu. Baha'ullah mengatakan “Kemah kesatuan telah ditegakkan, janganlah engkau memandang satu sama lain sebagai orang asing. Engkau adalah buah-buah dari satu pohon dan daun-daun dari satu dahan”. Umat Baha'i dianjurkan untuk menghapuskan segala prasangka buruk yang didasarkan pada perbedaan ras, agama dan kelas sosial. Bahkan keterlibatan dalam partai politik tidak dibolehkan, karena hanya akan memunculkan perpecahan. Setiap masalah diselesaikan dengan musyawarah dan harus didasari oleh sikap rendah hati dan penuh cinta.

Baha'ullah sangat menjaga agar umatnya tidak terpecah belah dalam berbagai sekte. Ini dapat dilihat dalam penunjukan Baha'ullah terhadap putranya sebagai satu-satunya Pemimpin Agama dan Penafsir Sah tulisannya dan penunjukan Shoghi Effendi oleh Abdul Baha' sebagai Wali Agama. Semangat kesatuan tidak hanya untuk umat Baha'i, tetapi Baha'ullah menilai bahwa sudah saatnya menciptakan kesatuan umat manusia dan persatuan dunia. Ia menjelaskan sebagai berikut: “Kesejahteraan, kedamaian dan keamanan umat manusia, tidak mungkin tercapai kecuali bila persatuan telah didirikan dengan teguh”.

Selain 3 konsep utama ini, Baha'ullah juga mengajarkan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, penghapusan kemiskinan dan kekayaan yang berlebihan, kesesuaian antara agama dan ilmu pengetahuan, mencari kebenaran secara bebas, pendidikan wajib bagi semua anak, pentingnya bahasa persatuan dunia dan setia kepada pemerintah.

Saat ini ada 4 program yang dilaksanakan oleh semua masyarakat Baha'i di semua wilayah, yaitu: kelompok belajar, doa bersama, kelas anak-anak, kelas remaja. Kegiatan ini bersifat terbuka untuk semua orang dengan latar belakang agama dan suku apapun. Bahkan dalam doa bersama contohnya, semua penganut agama saling memperdengarkan satu sama lain doa-doa yang diajarkan di masing-masing agama. Dan sebagai umat Baha'i, mereka diajarkan untuk merasa senang didoakan serta mendoakan.

Ibadah umat Baha'i, antara lain, *pertama*, sembahyang yang boleh dipilih salah satu dari 3 tatacara, sembahyang pendek, sedang dan panjang dengan waktunya dari jam 12 siang - 6 sore, jam 6 pagi - 12 siang dan 24 jam. Kewajiban ini dimulai dari usia 15 tahun sampai 70 tahun. Ibadah ini dilaksanakan secara sendiri-sendiri. *Kedua*, berdoa setiap pagi dan petang. Berdoa ini adalah dengan membaca Tulisan-Tulisan Suci Baha'ullah. *Ketiga*, melaksanakan puasa selama 1 bulan (19 hari) yaitu pada tanggal 20 Maret. Bagi umat

of foolishness control you among other people. Everything comes from God, and to Him all will return. He is the source of everything and all ends in Him”.

Third, as God is One and all religions are one, mankind is fundamentally also one. Baha'ullah said “The tabernacle of unity hath been raised; regard ye not one another as strangers. Ye are the fruits of one tree, and the leaves of one branch”. Baha'i community is suggested to eliminate all prejudices based on difference in race, religions, and social classes. Even, engagement in any political parties is forbidden as it will only result in dissection. All problems are to be settled with a discussion to reach agreement and have to be based on humility and love.

Baha'ullah really ensured that his followers were not divided into various sects. This was demonstrated by Baha'ullah's appointment of his son as the only Religious Leader and the Authorized Interpreter of his writings, and appointment of Shoghi Effendi by Abdul Baha' as Guardian of the Faith. The spirit of oneness is not merely aimed for the Baha'i community themselves; instead Baha'ullah viewed it was time to create unification of human beings and unity of the world. He explained: “Prosperity, peace, and safety of human kind can never be reached unless when fellowship has been strongly established”.

In addition to these 3 main concepts, Baha'ullah also taught equality between men and women, eradication of poverty and excessive wealth, harmony between religion and science, independent investigation of the truth, universal compulsory education for all children, and the significance of the universal auxiliary language and loyalty to the government.

At present, there are 4 (four) programs carried out by Baha'i community in all regions, namely: study circles, devotional services, children classes, and youth classes. These programs are open for everybody of different religious or tribal backgrounds. Even in the devotional services as an example, adherents of all religions would recite aloud the prayers taught in each religion. As a member of Baha'i community, they are taught to feel pleased that someone would pray for them and to pray for others.

The worshipping of the Baha'i community, among others are, *first*, reciting prayers with alternative of one of the 3 (three) rituals: short, medium, and long praying rituals, from 12 pm - 6 pm, 6 am - 12 pm, and 24 hours. This obligation applies when one is 15 years to 70 years of age. This prayer is recited individually. *Second*, praying every morning and evening. This is done by reciting the Sacred Writings of Baha'ullah. *Third*, to do fasting for 1 month (19 days), on 20 March. For Baha'i community, one year is divided into 19 months, and these 19 months comprise 19 days each. If we multiply it, the total number in one year is 361 days. There are 4 days regarded as intercalary days. The Baha'i calendar begins on 21 of March, commonly referred to as the New Year / Feast of *Naw-ruz*.

The Baha'i House of Worship are referred to as *Mashriqul Adzkar* (the rising place of the Remembrances

Baha'i, satu tahun dibagi pada 19 bulan, dan 19 bulan ini terdiri dari 19 hari. Jika dikalikan semua, jumlahnya adalah 361 hari. Ada 4 hari yang dianggap sebagai hari sisipan/hari kekosongan. Tahun baru/permulaan tahun adalah pada tanggal 21 Maret, dan biasanya diistilahkan dengan Tahun Baru *Nawruz*.

Rumah ibadah umat Baha'i disebut *Mashriqul Adzkar* (*tempat terbit/munculnya pujian-pujian*). Rumah ibadah ini memiliki 9 pintu dengan sebuah kubah di tengahnya dan diperuntukkan tidak saja bagi umat Baha'i, melainkan juga bagi seluruh umat beragama. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, *Mashriqul Adzkar* juga menjadi pusat berbagai kegiatan sosial masyarakat setempat, seperti rumah sakit, pendidikan, panti jompo dan lain-lain.

MASYARAKAT BAHAI INDONESIA DALAM KONTEKS BERBANGSA DAN BERNEGARA

Permulaan kedatangan agama Baha'i di Indonesia adalah pada tahun 1890, melalui 2 tokoh pedagang Persia, yaitu Gamal Effendi dan Syekh Musthafa Rumi. Ketika itu, Baha'i belum begitu berkembang, namun kedua tokoh ini diceritakan sempat bertemu dengan beberapa Raja di Indonesia, seperti Raja Bone dan Pare-Pare. Pada tahun 1955, beberapa pelopor Iran datang ke Indonesia. Kebanyakan di antara mereka adalah dokter yang kemudian ditempatkan di beberapa daerah terpencil di Indonesia. Melalui mereka, agama ini berkembang dengan baik dan saat ini, diperkirakan ada ribuan umat Baha'i yang tersebar di kepulauan Indonesia. Majelis Nasional Baha'i sendiri dibentuk pada tahun 2000 dan bertempat di Jakarta. Saat ini memang belum ada rumah ibadah Baha'i di Indonesia karena konstruk sosial dan budaya masyarakat masih belum terbuka untuk menerima dan mengungkapkan perbedaan keyakinan, sehingga yang perlu dibangun lebih dahulu adalah kondisi sosial dan budaya masyarakat untuk bisa berkumpul bersama.

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, masyarakat Baha'i berhak mendapatkan hak yang sama dengan umat lainnya. Hak sipil, pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus dilindungi oleh negara sebagai penyelenggara pemerintahan. Namun yang terjadi di lapangan, kondisi yang dialami oleh masyarakat Baha'i sama dengan kepercayaan minoritas lainnya. Dalam kehidupan bernegara, mereka mengalami perlakuan yang diskriminatif dan oleh sebagian masyarakat, mereka sering dianggap aneh dan sesat.

Beberapa contoh kasus yang ditemui dalam wawancara dengan beberapa orang teman Baha'i adalah sebagai berikut: *pertama*, adanya kebijakan yang tidak sama yang dirasakan oleh umat Baha'i saat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di sebagian tempat, mereka harus mencantumkan salah satu dari 6 agama yang diakui negara di dalam kolom agama. Di

of God). This House of Worship has 9 (nine) doors with a dome in the middle and is open not only to Baha'i community, but to all, regardless of their religions. In addition to its function as house of worship, *Mashriqul Adzkar* also serves as a center of various social activities of the local community, such as a hospital, a school, a home for the elderly, etc.

INDONESIAN BAHAI COMMUNITY IN THE CONTEXT OF LIFE OF THE NATION AND IN THE COUNTRY

The arrival of the Baha'i faith in Indonesia in the 1890 was by means of two Persian traders, namely Gamal Effendi and Syekh Musthafa Rumi. At the time, Baha'i was not really developed yet, but these two figures were told to have met a number of kings in Indonesia, such as the king of Bone and Pare-Pare. In 1955, a number of Iranian pioneers arrived in Indonesia. Most of them were medical doctors who were then positioned in some remote areas in Indonesia. Through them, this religion was developed well, and today, it is estimated that there are thousands of members of Baha'i community spread in the Indonesian archipelago. Baha'i National Spiritual Assembly in Indonesia was established in 2000 in Jakarta. At present, there is no House of Worship for the Baha'i community in Indonesia due to the still-inclusive social and cultural construction of the community which is still not open to receive and disclose different faiths; what needs to be built first is the social and cultural conditions of the community to be able to unite as one despite any differences.

As a part of Indonesian citizens, Baha'i community ought to have the same rights as other religious congregations. Civil rights, right for education, health, and economy have to be protected by the State as governmental implementer. Nevertheless, what happens in the field is that the treatment received by the Baha'i community in the country is the same as what is experienced by adherents of other minor beliefs. In the life of the country, they experience discriminative treatment and by some members of the society, they are often considered as weird and as a heresy.

A number of case examples found in the interviews with some of Baha'i friends are as follows: *first*, there was an unequal treatment experienced by members of the Baha'i community when they process their ID Cards (KTP). At some areas, they are required to write one of the 6 (six) religions recognized by the state under the religion column. In other areas, the religion column in their ID card is not filled. However, some others are allowed to put Baha'i Faith as their religion in their ID card. *Second*, there is difficulty experienced by the children of Baha'i community when they enter their educational period. There are schools that require these children to follow one of the religion subject taught at the schools. They are not facilitated to learn about their own religion. Nevertheless, there are also some schools which

tempat yang lain lagi, kolom agama ini justru dikosongkan. Tetapi ada juga pengalaman beberapa umat Baha'i yang boleh mencantumkan nama agamanya. *Kedua*, adanya kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak umat Baha'i ketika memasuki masa pendidikan. Ada sekolah yang memaksa anak-anak ini mengikuti salah satu pelajaran agama yang diajarkan di sekolah tersebut. Mereka tidak difasilitasi untuk belajar agama mereka sendiri. Tapi ada juga sekolah yang membolehkan mereka untuk tetap sekolah, dan proses pendidikan agama diserahkan pada komunitas Baha'i. Salah seorang Ibu, umat Baha'i, menceritakan pengalaman saat memasukkan anak pertamanya di salah satu sekolah. Meskipun di sekolah itu hanya ada 2 orang penganut salah satu dari 6 agama yang diakui, sekolah tetap menyediakan guru agama bagi mereka, namun sebaliknya, sekolah tidak mau menyediakan guru agama bagi anaknya yang beragama Baha'i. Sedangkan saat memasukkan anak keduanya di salah satu sekolah yang lain, kepala sekolahnya menyatakan bahwa jika murid agama tertentu mencapai 10 orang, maka sekolah menyediakan guru agamanya. *Ketiga*, sebagian umat Baha'i di beberapa tempat sering dicap sesat, kafir dan sebagainya. Ini disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat tentang agama ini. Peran media dalam hal ini menjadi penting. Dalam beberapa kasus, media justru menjadi salah satu pemicu konflik.

Daerah-daerah yang pernah diwarnai konflik dengan umat Baha'i antara lain, Palu, Kutai, Banjaran, dan Tulungagung. Dalam begitu banyak kasus, umat Baha'i harus menjelaskan bahwa agama ini bersifat independen, bukan sempalan dari agama tertentu, memiliki keyakinan, nabi dan kitab suci sendiri. Kondisi ini membuktikan bahwa negara belum melindungi kebebasan berkeyakinan seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Negara seharusnya memfasilitasi setiap keyakinan yang ada di negara ini, bukan justru melakukan intervensi terhadap hal yang paling hakiki bagi manusia. Salah seorang teman Baha'i mengatakan, *"Agama bukanlah pemberian negara, masyarakat atau golongan. Dia turun atas kehendak Tuhan, berkedudukan di hati manusia di negara manapun. Agama itu satu di hati dan jiwa. Maka pembatasan, diskriminasi dan penentuan tingkat kebenaran sudah bukan wilayah yang ditangani negara. Tugas Negara adalah memfasilitasi dan bukan menentukan batasan kebenaran".* []

*Artikel ini ditulis berdasarkan wawancara dengan beberapa teman Bahai di Bandung dan website resmi Bahai (Nasional dan Internasional)



allow them to stay in school with religion education process handed over to the Baha'i community. One of the mothers, member of Baha'i community, shared her experience when registering her first child to school. Even though at the school there are only two students embracing one of the six recognized religions, the school still provided a teacher of religion for them, but in contrast, the school would not provide any teacher of religion for her child who is of Baha'i faith. When she enrolled her second child to another school, the principal stated that if the number of students of a certain religion reaches 10 people, the school would provide a teacher for the said religion. *Third*, Baha'i community in some areas are often considered as a heresy, infidels, etc. This is due to the misunderstanding of the society of this religion. The role of the media in this case is vital. In a number of cases, the media instead became one of the triggers of the conflict.

The areas which have ever seen conflicts with the Baha'i community are among others Palu, Kutai, Banjaran, and Tulungagung. In so many cases, members of the Baha'i community have to explain that their religion is of an independent nature, not a denomination of any certain religion, with its own faith, prophets, and Sacred Scripture. This condition demonstrates that the state has yet to protect freedom of religion as stipulated in the Constitution (UUD) of 1945. The State should facilitate every belief existing in the country instead of conducting intervention toward the most basic subject for human beings. One of Baha'i friends said, *"Religion is not given by the state, community, or group. It comes down on God's will, and takes place in the heart of human being in any country. Religion is one in heart and soul. Thus, limitations, discriminations, and decision on the level of truth are no longer in the sphere managed by the state. The task of the state is to facilitate and not determines the limitation of truth".* []

MAWALE CULTURAL CENTER MANADO

Oleh: Isa Abdurrahman

Kesadaran akan keterpinggiran hak-hak kultural, politik, dan ekonomi, atau keterpinggiran peradaban secara umum, pada gilirannya akan mendorong lahirnya gerakan untuk merebut kembali hak-hak tersebut. Memanglah benar pesan para pendahulu gerakan bahwa hak tidak bisa diperoleh dengan ditunggu karena hak itu harus direbut (kembali) setelah sekian lama dirampas. Sekelompok orang muda yang menyadari keterpinggiran kebudayaan mereka oleh proses sejarah, telah menggagas kerja-kerja konkret untuk meraih, menggali, menemukan, dan menghidupkan kembali nilai-nilai lokal kebudayaan mereka. Mereka tergabung dalam komunitas Mawale Movement atau Mawale Cultural Center.

SEKILAS SEJARAH

Mawale Cultural Center, Pusat Pikir dan Kerja Budaya di Utara Sulawesi adalah sebuah komunitas kerja kolektif bersifat non-profit yang didirikan di Manado pada bulan Maret 2005. Deklarasi berdirinya komunitas kerja ini dilakukan bersamaan dengan rentetan peluncuran tiga antologi puisi berbahasa Melayu Manado yang diselenggarakan sepanjang bulan itu. Pada saat itu, sebagian besar media di Sulawesi Utara lebih mengenal komunitas kerja ini dengan nama *Mawale Movement*, sebagai sebuah gerakan kebudayaan yang digagas oleh anak-anak muda (sebagian besar adalah seniman) yang beraktifitas di fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT).

Pada awalnya komunitas kerja ini adalah sebuah gerakan seni, yang dalam proses selanjutnya meluas menjadi sebuah gerakan dengan spirit pembangunan kebudayaan. Mereka yang tergabung dalam komunitas kerja ini pada awalnya adalah anak-anak muda Minahasa yang menaruh kepedulian terhadap kebudayaan tanahnya, yang dalam proses selanjutnya meluas hingga ke wilayah Nusa Utara dan Gorontalo. Mereka yang tergabung di sini berasal dari berbagai macam latar belakang agama, Kristen, Islam, Konghucu, dan para penghayat agama tua Minahasa, dan agama-agama yang lain.

Mawale Cultural Center menjadi wadah berkumpul, bertukar ide dan melakukan kerja bersama di bidang kebudayaan oleh kaum muda yang datang dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi tetapi disatukan oleh kesamaan cara pandang tentang

MAWALE CULTURAL CENTER MANADO

By: Isa Abdurrahman

Awareness of the marginalization of cultural, political, and economic rights, or of civilization in general will in turn encourage the birth of a movement to claim these rights back. The message of the pioneers of this movement is right when they said that our rights cannot be gained by only waiting as these rights have to be (re)claimed after being taken away for so long. A group of youths aware of the marginalization of their culture by the historical process has initiated concrete work to regain, uncover, find, and resurrect the local values of their culture. They are joined in a community of Mawale Movement or Mawale Cultural Center.

A GLIMPSE OF HISTORY

Mawale Cultural Center, A Center of Thinking and Cultural Work in the North of Celebes is a collective working community of a non-profit nature established in Manado in March 2005. The declaration of the establishment of this working community was conducted at the same time as a series of launching of three poetry anthologies of Manado-Malay language held during the whole month. At that time, most of the media in North Sulawesi knew this working community with the name *Mawale Movement*, as a cultural movement initiated by a group of young people (most of whom are art workers) based at the Literature Faculty of Sam Ratulangi University (UNSRAT).

At the beginning, this working community was a movement in art, which in the process expanded into a movement with the spirit of cultural development. Those joining in this working community were initially the young people of Minahasa with concerns to the culture of their land, which in the next process developed to Nusa Utara and Gorontalo. They are of different religious backgrounds: Christianity, Islam, Confucianism, adherents of old religion of Minahasa, and other religions.

Mawale Cultural Center becomes a gathering forum for exchanging of ideas and conducting cooperation in the cultural field by the young people of different educational and professional backgrounds, yet united by the same perception on interpreting the culture of today. Scholars, theater workers / art workers, musicians, theologians, paramedics, journalists, writers, academicians, even martial artists come together and discuss various issues in this forum. Those joining and

memaknai kebudayaan hari ini. Sastrawan, pekerja/seniman teater, musisi, teolog, paramedis, jurnalis, pelukis, akademisi, bahkan atlet bela diri sekalipun bersama-sama bergabung dan berembung secara aktif di ruang ini. Yang bergabung dan aktif berdiskusi di komunitas ini juga berasal dari berbagai latar belakang universitas seperti Universitas Sam Ratulangi Manado, Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT), Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Universitas Gorontalo (UG), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado, Universitas Negeri Manado (UNIMA) Tondano, bahkan ada juga di antara mereka yang sedang studi di luar daerah seperti para mahasiswa yang belajar di Universitas Udayana Bali dan Institut Kesenian Jakarta.

VISI MAWALE

Dari akar katanya, Mawale berasal dari kata "Ma" dan "Wale". Kata "ma" adalah sebuah awalan yang bermakna kata kerja. Sementara "wale" berarti "rumah". Dengan demikian Mawale berarti "membangun rumah" atau "pulang kembali membangun rumah". Maka, Mawale Movement adalah gerakan pulang kembali ke rumah identitas asal, membangun gerakan untuk membangun puing-puing peradaban Minahasa.

Para penggagas Mawale Movement memahami bahwa Minahasa telah mengalami degradasi nilai yang cukup jauh dan saat ini berada dalam realitas kehidupan yang sangat berbeda jauh dari nilai-nilai yang ditanamkan dan ditinggalkan oleh para leluhur. Minahasa telah melewati masa kolonialisme, yang di satu pihak telah membawa transformasi, misalnya melalui pendidikan, tetapi justru di sisi yang lain telah terjadi imperialisme kebudayaan. Selanjutnya, masa di mana Minahasa memilih untuk menjadi bagian dari NKRI, merupakan masa penyeragaman yang menjadikan Minahasa hampir kehilangan identitas, karena semuanya tersentralisasi ke pusat (Jakarta). Permesta adalah reaksi di tahun 1952 sampai awal 1960-an terhadap hegemoni pusat. Itulah persisnya masa di mana orde baru meminggirkan hak-hak kultural, politik dan ekonomi Minahasa secara telak.

Dengan latar kesadaran demikian, para penggagas merumuskan bahwa Visi Mawale Cultural Center adalah terbangunnya peradaban Minahasa yang unggul, setara dengan bangsa-bangsa lain, dengan prinsip-prinsip egaliter, demokratis dan terbuka. Para penggagas memimpikan Minahasa sebagai lokus yang menerima perbedaan, demokratis dan unggul di bidang ekonomi dan politik

actively involved in discussions in this community are of different university backgrounds such as Sam Ratulangi University in Manado, Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT / Tomohon Christian University of Indonesia), Universitas Negeri Gorontalo (UNG / State University of Gorontalo), Gorontalo University (UG), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN / State Islamic Academy) Manado, Universitas Negeri Manado (UNIMA / Manado State University) of Tondano, in addition to some studying out of the region such as University of Udayana Bali and Institut Kesenian Jakarta / Jakarta Art Institute.

THE VISION OF MAWALE

The root words of Mawale are the words "Ma" and "Wale". The word "ma" is a prefix for a verb, while "wale" means "house". Thus, Mawale means "building a house" or "returning to build a house". Hence, Mawale Movement is a movement of retuning back to a home where one belongs, moving to build the ruins of Minahasa civilization.

The initiators of Mawale Movement understand that Minahasa has undergone such degradation of values and is at present living in a reality very different from values already sowed and left behind by the ancestors. Minahasa underwent times of colonialism, which on one side brought about transformation, for example through education, but on the other side also caused cultural imperialism. In its journey, the time Minahasa chose to be a part of the Republic of Indonesia (NKRI), was a time of uniformity causing Minahasa to almost lose its own identity, as everything was centralized to the center (Jakarta). Permesta was a reaction in 1952 to early 1960s towards this hegemony of the central government. This was exactly the time when the New Order completely marginalized cultural, political, and economic rights of Minahasa.

It was with this awareness as the background that the initiators formulated that the vision of Mawale Cultural Center was the construction of a superior Minahasa civilization, equal to that of other nations, with egalitarian, democratic, and open principles. The founding fathers dreamed of Minahasa as a locus accepting differences; a place of democratic and superior nature in economy and politic.

LATEST PROGRESS

Today, Mawale Cultural Center also publishes books, media syndication, open-source technological development and researches, construction of art-cultural basis, development of publications facilities through internet media, encouraging innovations in literature by means of Gerakan Sastra Bahasa Melayu Manado / Manado Malay Language and Literature Movement, in addition to many other activities prepared for the future.

PERKEMBANGAN TERAKHIR

Hari ini, Mawale Cultural Center juga menerbitkan buku, sindikasi media, pengembangan dan penelitian teknologi open source, pembangunan basis-basis seni kebudayaan, pembangunan sarana publikasi lewat media internet, mendorong inovasi di bidang sastra lewat Gerakan Sastra Bahasa Melayu Manado, dan masih akan ada banyak lagi jenis aktivitas lain yang disiapkan ke depan. Awal tahun 2010 ini, bersama Gerakan Muda Minahasa dan CV Media Rakyat Minahasa, Mawale Cultural Center menerbitkan majalah kebudayaan *Waleta Minahasa*. Majalah ini terbit sebulan sekali dan mengambil fokus perhatian kepada ulasan-ulasan sejarah, seni, sastra, budaya serta dinamika agama-agama di Tanah Minahasa/ Sulawesi Utara.

Sekarang ini, Mawale Cultural Center adalah federasi dari berbagai kelompok seni budaya yang jumlahnya lebih dari puluhan kelompok dan kolektif kerja yang tersebar dari Nusa Utara hingga ke Gorontalo. Meskipun berkantor di Tomohon, gerakan ini menyebar dalam sebuah kesatuan visi membangun kebudayaan hari ini.

KEGIATAN

Berbagai kegiatan rutin yang dilakukan antara lain:

- * Diskusi/Temu Budaya Mawale setiap tanggal 9 di bulan berjalan
- * Ekspedisi atau ziarah kultural menjejak jejak-jejak peradaban di Minahasa
- * Menerbitkan Majalah Waleta Minahasa
- * Pelatihan menulis kreatif dan theater

AGENDA KEDEPAN:

- * Kegiatan Sekolah Mawale

MODEL PENGORGANISASIAN

Model kepemimpinan di Mawale Cultural Center adalah kepemimpinan yang bersifat kolektif yang diganti setiap tiga tahun sekali.

Seluruh kerja keras yang dijalankan oleh mereka yang tergabung dalam gerakan Mawale ini, bukan dimaksudkan untuk menunjukkan "keakuan" identitas dan nilai-nilai kebudayaan mereka sendiri, melainkan dimaksudkan sebagai sikap kritis yang mau menyatakan bahwa perbedaan, keunikan, dan kemajemukan di negeri ini semestinya dihormati, dilindungi dan dijamin hak-hak kehidupannya. Dengan demikian, perbedaan dan kemajemukan (*diversities*) merupakan *sunnatullah* yang pantas untuk diterima dan dikelola secara bijak, bukan untuk dikontrol dan diseragamkan.[]



Beragam Kegiatan Mawale

At the beginning of year 2010, in collaboration with Gerakan Muda Minahasa / Minahasa Youth Movement and CV Media Rakyat Minahasa, Mawale Cultural Center published a magazine on culture *Waleta Minahasa*. This magazine is issued once a month and is focused on writings on history, art, literature, culture, and dynamics of religions on the land of Minahasa / North Sulawesi.

At the present, Mawale Cultural Center is a federation of various art-cultural groups which number is quite large, spread from Nusa Utara to Gorontalo. Even though based in Tomohon, this movement is spread in a united vision of building the culture of the present.

ACTIVITIES

Various routine activities held are among others:

- * Discussion / Cultural meeting of Mawale on the 9th of every month
- * Cultural expedition or excursion seeing traces of civilization in Minahasa
- * Publish Waleta Minahasa magazine
- * Training of creative writing and theater

FUTURE AGENDA:

Mawale School Activity

All the hard work already made by those joining this Mawale movement was not aimed to show the "egocentricity" of their own identity and cultural values, but was meant as a critical attitude stating that differences, uniqueness, and plurality in this country are supposed to be respected, protected, and guaranteed to live. Therefore, differences and plurality are a *sunnatullah* that needs to be accepted and managed wisely, not to be controlled and uniformed. []

MELAWAN DENGAN KEARIFAN LOKAL

Oleh Denni Pinontoan

Tatanan masyarakat dunia yang saling terintegrasi sedang berlangsung. Kemajuan ilmu pengetahuan dengan penemuan perangkat teknologi menghasilkan sistem komunikasi dan transportasi yang semakin cepat dan akurat. Masyarakat dunia yang saling berbeda ruang kini seolah hanya dibatasi sekat tipis. Internet membuat masyarakat dunia yang saling terpisah ruang terhubung dalam kata-kata, suara, dan gambar. Inilah dunia kita sekarang, yakni dunia yang oleh sebagian orang dianggap menawarkan masa depan yang cerah, tetapi oleh sebagian orang lain lagi dianggap sebagai ancaman yang mencemaskan.

IMPERIALISME YANG MENGGODA

Mencemaskan! Kita berucap demikian ketika globalisasi - yakni sebuah proses pengintegrasian masyarakat dunia dengan kata-kata, suara dan gambar, atau dengan sistem ekonomi global, yang oleh George Ritzer disebut sebagai sebuah kehampaan - memaksa masyarakat yang paling sudutpun untuk ikut masuk ke dalamnya. Masyarakat yang bertahan hidup dengan nilai-nilai lokal "terancam", ketika perangkat hidupnya perlahan mulai dipaksa diganti dengan perangkat-perangkat import produksi dunia modern. Kecanggihan modern dilawankan dengan kekolotan tradisional.

Dahulu, ketika imperialisme dan kolonialisme hadir dengan ekspansi militer yang menundukkan tubuh dan mengkapling tanah, yang dilakukan adalah melawan dengan senjata. Namun, tidaklah begitu sekarang. Penundukan tubuh dan pikiran kadang-kadang sulit diidentifikasi ketika ekspansi kebudayaan hadir dalam rupa-rupa wajah yang menggoda. Mesin-mesin hasrat, seperti mall, restoran cepat saji, perangkat komunikasi (misalnya handphone yang murah tapi lengkap), dan juga iming-iming kebebasan, pluralisme, demokrasi dan kesetaraan tanpa disadari membawa juga agenda tersembunyinya, yaitu sentralisme gaya hidup, cara pikir dan perilaku. Inilah imperialisme dan kolonialisme dalam wajahnya yang menggoda. Semua itu memang menggoda. Kampanye melalui iklan di media cetak dan elektronik mampu membawa kita ke dunia imajinasi yang tanpa batas. Kepuasan cita rasa hidup seolah hanya bisa dijawab dengan terpenuhinya kebutuhan material. Kita butuh kecerdasan dan spirit serta sistem

FIGHTING WITH LOCAL WISDOMS

By Denni Pinontoan

The order of one integrated global community is in place. Development of science with findings of technological wares results in a faster and more accurate system of communication and transportation. The global community of different worlds now seems to be limited just with a thin layer of divider. The internet connects the global community of separated worlds with words, sounds, and images. Thus is our present world; a world considered offering a bright future, but also bringing about worrisome threats.

TEMPTING IMPERIALISM

Worrisome! We say the word when globalization a process of integration of the global community with words, sounds, and images, or with a global economic system, which George Ritzer refers to as a void forcing the most marginalized society to enter. A community surviving with "threatened" local values, when their life wares are slowly replaced forcefully with an import wares produced by the modern world. Modern sophistication is put against traditional conservatism.

In the past, when imperialism and colonialism were present with a military expansion conquering bodies and taking over land, the resistance was armed. However, today it is not the case. The subjugating of body and mind is at times difficult to identify when cultural expansion is present on different tempting facades. Instruments of desires, such as malls, fast-food restaurants, communication devices (e.g. cheap yet complete cell phone), other than the offer of freedom, pluralism, democracy and equality, without us realizing, also bring about its hidden agenda, centralism of lifestyle, ways of thinking, and behavior. It is the imperialism and colonialism with their tempting facade. Campaigns through advertisements in printing and electronic media are able to bring us to the world of unlimited imaginations. Satisfaction over life zest seems to be able to be answered only with fulfillment of material needs. We need smartness and spirit as well as strong system of values to deal with it.

Our community is obsessed with all the offers that are indeed tempting. Hard work is no longer aimed only to eat, clothe, or for a dwelling. Another objective of a more dominant nature is the satisfaction of any personal desire for the enjoyment of quantity of a temporary

nilai yang tangguh dalam menghadapinya.

Masyarakat kita pun terobsesi oleh segala tawaran yang memang menggoda itu. Kerja keras bukan lagi sekadar untuk makan, berpakaian atau untuk tempat tinggal, melainkan lebih daripada itu. Tujuan lain yang dominan adalah terpenuhinya hasrat pribadi untuk kenikmatan kuantitas yang sering hanya sesaat. Kini, kebanyakan masyarakat kita berfokus pada perebutan kekuasaan dan pamer diri untuk popularitas. Hubungan sosial terjadi secara ekonomis berdasarkan untung rugi. Hedonisme, materialisme dan individualisme menggejala. Hubungan kekerabatanpun menjadi terancam. Aktivitas bersosial, berpolitik, berekonomi, beragama, dan berkebudayaan menjadi tidak khas lokus, tidak memberi makna yang lebih bagi konteks lokal. Kita seolah sedang tergantung pada sesuatu yang hanya hadir dalam gambar, kata, suara atau materi yang sebenarnya asing. Itulah imperialisme kebudayaan. Kita sedang terjajah oleh iming-iming wacana yang diproduksi oleh para pengendali ekonomi dan politik global. Minahasa agaknya sedang mengalami itu.

Si imperialis hendak menguasai jiwa (*de geest, the mind*) dari suatu negara lain. Dalam kebudayaan terletak jiwa dari suatu bangsa. Jika kebudayaannya dapat diubah, berubahlah jiwa dari bangsa itu. Si imperialis hendak melenyapkan kebudayaan dari suatu bangsa dan menggantikannya dengan kebudayaan si imperialis, hingga jiwa bangsa jajahan itu menjadi sama atau menjadi satu dengan jiwa si penjajah. Menguasai jiwa suatu bangsa berarti menguasai segala-galanya dari bangsa itu. Imperialisme kebudayaan ini adalah imperialisme yang sangat berbahaya, karena masuknya gampang, tidak terasa oleh yang akan dijajah dan jika berhasil sukar sekali bangsa yang dijajah dapat membebaskan diri kembali, bahkan mungkin tidak sanggup lagi membebaskan diri.

MENGKALI KEARIFAN LOKAL MINAHASA, MEMBANGUN KEKUATAN

Ada sebuah ungkapan yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. "Si tete timete witu tinetean ni tete ni tete", begitu bunyi ungkapan itu. "Para leluhur telah mengikuti jalan dari leluhurnya," setidaknya secara harafiahnya demikian kita bisa mengartikannya. Sebuah ungkapan yang memberi makna betapa pentingnya kita, Tou Minahasa sekarang untuk belajar dari cara hidup para leluhur. Inilah proses berbudaya yang aktif. Mengkaji dan menginterpretasi warisan nilai masa lalu dalam menghadapi tantangan kehidupan kekinian demi melanjutkan kehidupan sampai di masa depan.

Tapi, tak mudah memang untuk mengkaji warisan nilai masa lalu itu, ketika perubahan dan pembauran telah menjadi sesuatu yang nyata dalam peradaban Minahasa sampai hari ini. Peradaban ini telah melewati berbagai masa. Para kolonial, bukan saja telah menun-

nature. Today, most of our community is focused on fighting of power and self exhibition for popularity. Social relationship occurs economically are based on loss and profits. Hedonism, materialism, and individualism are spreading. This results in threatened kinship. Social, political, economic, religious, and cultural activities do not always have specific *local taste*, not giving any excessive meaning for the local context. It is as if we are depending on something that is only present in the forms of images, words, noise, or material that are actually of a foreign

Aktivitas bersosial, berpolitik, berekonomi, beragama, dan berkebudayaan menjadi tidak khas lokus, tidak memberi makna yang lebih bagi konteks lokal

nature. Hence is what we call cultural imperialism. We are being subjugated by the offer of discourse produced by controllers of global economy and politic. Minahasa is apparently still undergoing this.

The imperialist wishes to control the mind (*de geest*) of another country. In culture lies the soul of a nation. If the culture is alterable, the soul of the nation is also changed. Controlling the soul of a nation means controlling everything of the nation. This cultural imperialism is a very dangerous kind, as the infiltration is very easy, cannot be felt, and if succeeded, it is very difficult for the nation subjugated to free themselves, even it may be impossible for them to free themselves.

DISCOVERING THE LOCAL WISDOM OF MINAHASA, BUILDING THE STRENGTH

There is an expression left behind by our ancestors. "Si tete timete witu tinetean ni tete ni tete". "The ancestors have followed the way of their ancestors," at least it is what it means, literally; an expression giving a sense of how important it is for us, present Tou Minahasa, to learn from the way of life of our ancestors. This is the active process of living the culture: discovering and interpreting the heritage of the past values in dealing with challenges of present life for the sake of continuing life to the future.

It is indeed not easy to discover the heritage of the past values, when changes and assimilation have

dukkan tanah ini dalam pengertian fisiknya, namun juga cara pikir, dan mungkin sampai gaya hidup, dan sudah tentu cara bertindak *tou* Minahasa. Perjumpaan itu memang tidak terjadi secara imbang. Meskipun harus diakui bahwa dari proses perjumpaan itu beberapa nilai positif telah memberi sumbangan bagi tanah ini.

Bersamaan dengan masa kolonial itu, agama Kristen, terutama Kristen Protestan dari Barat dengan teologinya yang bercorak *pietis* datang memperkenalkan sistem nilai keagamaan dan kebudayaan yang baru. Penghakimanpun terjadi. *Tou* Minahasa yang hidup dengan nilai-nilai keminahasaannya dicap kafir, terbelakang, bodoh, kolot dan tidak beradab. Konversi nilai-nilai budaya terjadi secara paksa. Monisme moral bangsa Barat dan juga kekristenan telah menyebabkan kebudayaan ini terdegradasi.

Di masa kemerdekaan pergeseran nilai-nilai budaya berlanjut. Penyeragaman semua hal memaksa *Tou* Minahasa untuk menjadi "Indonesia", dan hampir menanggalkan keminahasaannya. Istilah-istilah seperti "primordialisme" dan "separatisme" menjadi momok di masa orde baru ketika ekspresi kebudayaan lokal melebihi apa yang dimau oleh para pemegang kekuasaan. Hampir tiada ruang untuk menjadi "*tou* Minahasa", menjadi manusia yang berbudaya Minahasa, yang berpikir dan bertindak dari nilai-nilai lokal. Bersamaan dengan itu politik sentralistis dan sistem ekonomi yang kapitalistis menggeser corak hidup *tou* Minahasa khas lokal yang komunal dan sosialis.

Tapi kita belum terlambat. Menggali nilai-nilai pra modern, nilai-nilai tradisional bahkan menjadi sesuatu yang mendesak ketika logika modern yang tanpa rasa itu telah melahirkan sejumlah dampak yang menyeramkan. Nilai-nilai warisan leluhur itulah yang oleh para arifin disebutnya kearifan lokal (*local wisdom*). Minahasa memiliki segudang nilai kebajikan yang masih dapat ditelusuri dari berbagai simbol dan ingatan yang tersebar secara lisan maupun tulisan.

Dalam pengertian umum, kearifan lokal sering diartikan sebagai, "gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya," (Sartini, 2004). Istilah lain untuk kearifan lokal ini disebut juga "*local genius*". Haryati Soebadio, seperti dikutip Sartini, mendefinisikan "*local 'genius* sebagai *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Kecerdasan leluhur kitalah yang membuat nilai-nilai baru dari luar bisa diinterpretasi dan dikembangkan bersama nilai-nilai setempat. Memang, nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur tidak melulu dari kebudayaan setempat, tapi juga bisa dari hasil sebuah proses dialog dengan nilai-nilai dari luar. Dan itulah kecerdasan mereka.

Kearifan lokal dihasilkan dari sebuah perenungan manusia. Ketika dia hadir bersama komunitas, bersama alam dan interaksi dengan dunia luar, maka

become something actual in the civilization of present Minahasa. This civilization has passed through a range of times. The colonials have not just conquered the land in the context of its physique, but also the way of thinking, and perhaps also the life style, and for certain the way the *tou* Minahasa are acting. This meeting does not occur in a balanced way. Nevertheless, we should admit that from this meeting process, a number of positive values have made contribution to this land.

At the same time as the colonial era, Christianity, Protestantism of the West in specific with its theology with *pietis* color arrived and introduced a new system of religious and cultural values. Then judgment happened. *Tou* Minahasa who lived with their Minahasa values were labeled as infidels, left behind, stupid, old-fashioned, and uncivilized. Conversion of cultural values occurred with force. Monoism of the morality of the Westerners and Christianity had resulted in the degradation of the local culture.

In the independence era, shifting of cultural values continued. Uniformity of everything coerced *Tou* Minahasa to be "Indonesia", and almost left its Minahanesness. Terms such as "primordialism" and "separatism" became a specter in the new order era when expression of the local culture exceeded what the holders of power wanted. There was nearly no room to be "*tou* Minahasa", to be a human being with Minahasa culture, who thinks and acts based on local values. At the same time, centralistic politic and capitalistic economic system removed the local life style of *tou* Minahasa which is of communal and socialist nature.

But we are not too late. Discovering pre-modern values and traditional values have even become something urgent when this uncompassionate modern logics have given birth to a number of terrifying impacts. It is these values of ancestors' heritage that are referred to as local wisdoms by the wise men. Minahasa has a lot of wisdoms which can still be traced back from various symbols and memories spread orally as well as in writing. In its common connotation, local wisdom is at times interpreted as "local notions of a wise, astute, and good nature embodied in and followed by members of the community," (Sartini, 2004). Another term for local wisdom is "*local genius*". Haryati Soebadio, as quoted by Sartini, defined "*local 'genius* as a *cultural identity*, one which causes a nation to be able to absorb and manage foreign cultures according to its own outlook and capacity. It is the intelligence of our ancestors that makes it feasible for new foreign values to be interpreted and developed along with local values. Of course, the values passed on by the ancestors did not only come from local culture, but could also originate in a process of dialog with foreign values. And hence is their astuteness.

Local wisdom is resulted from the musing of human beings. When it is present together with the community, with the nature, and with interaction with the outside world, instincts and feelings then process everything it captures to be a value system. It is this value system that is then translated into a material form:

nalar dan rasapun mengolah segala yang dia tangkap untuk menjadi sistem nilai. Sistem nilai itulah yang kemudian diterjemahkan dalam wujud material: teknologi, perilaku, kerja, karya seni, dan lain-lain. Semua itu adalah untuk merespon dan menghadapi tantangan hidup. Itulah proses berkebudayaan manusia. Para leluhur kita juga melakukan itu. Kita kini, diwajibkan untuk melanjutkan itu dalam suasana dan waktu yang berbeda. Penggalan, interpretasi, dan revitalisasi terhadap warisan nilai-nilai itu adalah penting untuk menghadapi serbuan nilai kebudayaan lain yang tidak semua benar dalam konteks Minahasa.

Dalam konteks Minahasa, kita bisa melacak dan menemukan nilai-nilai kebajikan itu melalui mitos (legenda atau cerita-cerita rakyat), simbol-simbol yang ditinggalkan, karya seni, ungkapan-ungkapan dan praktek hidup, baik yang masih hidup maupun yang pernah ada. Banyak sekali sumbernya. Sebuah ziarah kultural, sebagai upaya menjejak ulang kebesaran peradaban ini perlu dilakukan. Sebab dari ziarah kultural itu kita bisa menemukan banyak sistem nilai atau kearifan para leluhur, baik langsung maupun tidak langsung telah memberi pengaruh bagi perkembangan peradaban Minahasa.

Kita perlu melakukan interpretasi terhadap praktek bertani para petani di Minahasa, seperti ketika mereka menanam padi atau jagung yang harus memperhatikan benda-benda langit seperti bulan atau bintang. Ada istilah "bulan bagus" dan "bulan jaha" pada petani ketika mereka hendak menebang pohon, menyemai bibit tanaman atau ketika panen. Jangan terburu-buru mengatakan itu tahyul, sebab ilmu pengetahuan modern telah menerangkan kepada kita bahwa ada hubungan langsung antara gravitasi atau gaya tarik menarik benda-benda angkasa, seperti antara bumi, bulan dan matahari dengan keadaan alam ini. Begitulah sehingga negeri Kiowa (Wanua Kiawa Kec. Kawangkoan), dalam pengetahuan-pengetahuan peninggalan para leluhur mempunyai istilah-istilah untuk benda-benda angkasa seperti bintang. Misalnya mereka menyebut "Wiru're-Indang" (Bintang Merah), untuk menunjuk cahaya bintang yang muncul di sebelah Timur, yang diartikan bahwa orang-orang tidak boleh bepergian ke arah itu karena di arah itu akan timbul penyakit atau bencana. Kemudian ada juga istilah "Wiru' Sera" (Bintang Ikan) untuk bintang yang dapat menunjukkan kepada nelayan di mana lokasi ikan bermukim di laut atau di danau (J.A. Worotitjan, 1999). Ini hanya contoh untuk menunjukkan bahwa para leluhur kita telah mengenal ilmu perbintangan, dan pengetahuan itu telah mereka pakai untuk memahami makna dirinya dalam alam semesta ini. Alam adalah tempat pijakan kehidupan yang dengan demikian maka hubungan organik harus dibangun agar alam senantiasa dapat menopang kehidupan manusia.

Kita masih bisa mendengar atau membaca dalam beberapa literatur sejarah mengenai sistem sosial dan politik masyarakat Minahasa tradisional. Seperti halnya sistem pemilihan *ukung* atau kepala *wanua* yang dilakukan secara demokratis. Itu sudah dilakukan di

technology, behavior, work, art, etc. it is all aimed to respond to and deal with challenges in life. Hence is the process of human life in culture. Our ancestors also did the same. Today, we are obliged to continue in the different situation and time. Discovery, interpretation, and revitalization of the heritage of these values are important to deal with the attack of values from other cultures which are not all proper in the context of Minahasa.

Within the context of Minahasa, we are able to trace and find these values of wisdom through the myths (legends or folklores), symbols left behind, art works, expressions and practices of life, whether those still alive or ever existed. A cultural pilgrimage, as an effort to trace back the greatness of this civilization needs to be carried out, as from this cultural pilgrimage, we can discover many value systems or wisdoms of the ancestors with direct or indirect impact to the development of Minahasa civilization.

We need to do interpreting towards farming practices of the farmers in Minahasa, like when they plant rice or corn when they have to pay attention to heavenly bodies like the moon or stars. There are terms "good moon" and "bad moon" for our farmers when they would like to cut trees, sow plant seeds, or when they do harvesting. Do not hurry in saying those were just superstitions, as modern science has explained to us that there is a direct relationship between gravity or gravitational force of heavenly bodies, such as between the earth, the moon, and the sun with the situation of this nature. Hence, the country of Kiowa (Wanua Kiawa Kec. Kawangkoan), in the knowledge passed on by the ancestors has terms for heavenly bodies like the stars. Take as an example, they say "Wiru're-Indang" (Red Star), to point at the star light appearing in the East, which is interpreted as people not being allowed to travel that way since a disease or disaster may appear that way. Then, there is also a term "Wiru' Sera" (Fish Star) for a star that could show fishermen the gathering place of fish in a sea or in a lake (J.A. Worotitjan, 1999). These are just examples to demonstrate that our ancestors had some knowledge of astronomy, and that they had used this knowledge to understand their meaning in this universe. Universe is a place for life in which an organic relationship needs to be built so that the universe could always support the life of human beings.

We can still hear or read in a number of historical literatures the social and political system of traditional Minahasa community. An example is the election system of *ukung* or head of *wanua* carried out in a democratic way, which had been conducted in Minahasa far before the French revolution which then brought the modern democracy system. Even, it has no relationship at all with the democracy developed in Greece, moreover with a new direct election system in place for the President, Governors, mayors / Heads of the district in Indonesia. The same system applies to election of *Tonaas* and *Walian* who play the role in government and religious spheres in the region. This is a proof that social, political, and religious institutions existing in the region is already

Minahasa jauh sebelum revolusi Perancis yang kemudian menghadirkan sistem demokrasi modern. Bahkan, itu tak ada hubungan sama sekali dengan demokrasi yang dikembangkan di Yunani. Apalagi dengan sistem pemilihan langsung Presiden, Gubernur, walikota/bupati yang baru di Indonesia.

Begitu pula dengan *Tonaas* dan *Walian* yang berperan di bidang pemerintahan dan keagamaan. Ini bukti bahwa institusi sosial, politik dan keagamaan sudah cukup tua. Sebuah tanda bahwa para leluhur kita adalah cerdas dalam mengatur, menata kehidupan komunitasnya. Kita perlu belajar dari sistem demokrasi khas Minahasa yang tidak mengutamakan uang dan kekuasaan tetapi menekankan kualitas intelektual, moral dan spiritual.

Kita juga memiliki ungkapan-ungkapan yang bernilai kehidupan. Misalnya, ungkapan "*Wahu nae, wahu un keroan*", yang secara harafiah berarti "kaki basah, kerongkongan juga basah". Artinya, orang dapat makan bila ia bekerja. Ungkapan lain berkata, "*Sau lutu tamburi mata*", yang secara harafiah berarti "menghadap bila sudah masak, membelakangi bila masih mentah". Ungkapan ini sering dipakai sebagai sindiran kepada orang-orang yang hanya suka makan tetapi tidak mau bekerja (K.A. Kapahang-Kaunang, 1997). Ungkapan-ungkapan semacam ini semakin relevan ketika konsumerisme dan hedonisme semakin menggejala akibat penetrasi kapitalisme yang membuat banyak orang semakin konsumernis dan seolah tak lagi menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Tou Minahasa juga makhluk religius. Nicolaus Graafland ketika datang ke Minahasa, sebelumnya memiliki asumsi-asumsi negatif terhadap *Tou* Minahasa. Namun, setelah melihat dari dekat kehidupan di Minahasa, dia kemudian jujur mengakui bahwa *Tou* Minahasa adalah manusia-manusia yang religius. Sebab, dari apa yang dia lihat ternyata *tou* Minahasa di masa dulu itu, sejak lahir, menikah, dalam kerja, sampai mati dipenuhi dengan ritual-ritual (*poso*) yang memusatkan penyembahannya kepada *Opo Empung*. Ini tentu merupakan sebuah catatan sejarah yang memberi pengesahan kepada generasi sekarang bahwa, dalam hal agama Minahasa tidak berbeda tingkat religiusitasnya jika dibandingkan dengan bangsa lain. Perbedaan terutama hanya cara atau bentuk pengungkapan ekspresi. Demikian, *Tou* Minahasa adalah juga manusia beradab, seperti manusia-manusia di peradaban lain. Masih perlu kita eksplorasi lagi nilai-nilai religius asli Minahasa untuk memperkaya nilai keagamaan modern. Model beragama yang fundamentalis dan konservatif yang semakin menggejala dalam kehidupan beragama dewasa ini telah memunculkan dampak kehancuran tata kehidupan bersama. Selain itu, hal ini terutama menegaskan nilai religiusitas *Tou* Minahasa yang mestinya memberi pengaruh positif dalam praktek politik, ekonomi dan aksi hidup apa saja.

Legenda Lumimuut -Toar, lepas dari keragaman versinya, secara baik menceritakan peran perem-

quite old. It is a sign that our ancestors were very smart in managing and putting their community life in order. We need to learn from the Minahasa democracy system which does not put forward money and power, but emphasizes on intellectual, moral, and spiritual qualities.

We also have other expressions with life values, for an instance the phrase "*Wahu nae, wahu un keroan*", which literally means "wet feet, wet throat": one can eat if s/he works. Another example is the phrase "*Sau lutu tamburi mata*", which literally means "come forward when already well-cooked, stand back to front when still uncooked". This expression is often used as a sarcasm to people who just want to eat without doing any work (K.A. Kapahang-Kaunang, 1997). Aforementioned examples of expressions are even more relevant when consumerism and hedonism are rising as a result of penetration of capitalism which makes more people more consumptive and even seems not appreciative of humane values.

Tou Minahasa is also a religious being. When Nicolaus Graafland first arrived in Minahasa, he had negative assumptions towards *Tou* Minahasa. Nevertheless, after seeing up close the life in Minahasa, he then honestly admitted that *Tou* Minahasa were indeed religious human beings. This is because he saw that the life of the then *tou* Minahasa, ever since they were born, married, working, all the way to their death, were filled with rituals (*poso*) which focused their worshipping to *Opo Empung*. This of course is a historical record that provides validation to us the present generation that Minahasa religion is not of a different religiosity level in comparison to other religions. The main difference merely lies on the ways or forms of expressions. Hence, *Tou* Minahasa is also civilized human being, as any mankind in other civilizations. We still need to explore further the native religious values of Minahasa to enrich the values of modern religiosity. Religious model of fundamentalist and conservative nature escalating in the religious life of the present has brought about a destructing impact in the order of a collective life. In addition, this especially emphasizes the values of religiosity of the *Tou* Minahasa which should give positive impacts in the political, economic practices, and in any actions in life.

The legend of *Lumimuut -Toar*, in spite of its various versions, tells the role of women in setting the stone of Minahasa civilization well. Discrimination against women, physically as well as verbally, is growing in our public sphere. This folklore constantly reminds *Tou* Minahasa of the position and authority of women. There is a value of equality contained within the legend. Interestingly, this folklore had long been present in the awareness and memories of *Tou* Minahasa far before the egalitarian spirit was voiced out by modern thinking.

The above numerous cultural values passed on by our ancestors are just a small part of what we have. Therefore, incessant efforts to discover it are required. In addition, there are also some of common expressions, such as "*Si Tou Timou Tumou Tou*", "*I Yayat U Santi*", or

puan dalam meletakkan dasar peradaban Minahasa. Diskriminasi terhadap perempuan, baik secara fisik maupun verbal semakin menggejala dalam ruang publik kita. Cerita ini senantiasa mengingatkan Tou Minahasa tentang kedudukan dan kewibawaan perempuan. Ada nilai kesetaraan yang dikandung dalam legenda itu. Menariknya, legenda ini telah lama hadir dalam kesadaran dan ingatan Tou Minahasa jauh sebelum semangat egaliter didengungkan oleh pemikiran-pemikiran modern.

Beberapa nilai budaya warisan leluhur di atas, hanyalah sebagian kecil dari yang kita punya. Makanya, perlu ada usaha terus-menerus untuk menggalinya. Selain itu, kita bisa tambah dengan beberapa yang sudah umum, seperti ungkapan "Si Tou Timou Tumou Tou", "I Yayat U Santi", atau juga kerjasama dalam spirit kebersamaan, "mapalus". Masih banyak lagi sistem nilai dan praktek budaya Minahasa yang perlu kita gali, interpretasi dan revitalisasi untuk dimaknai dalam konteks modern. Hal ini penting sebab ketika pemikiran modern mendominasi cara pikir dan tindak kita, rasionalisme, sekularisme dan menyusul beberapa ideologi modern seperti kapitalisme, komunisme, ateisme yang dominan mengandalkan logika, rasio dan cenderung mengabaikan intuisi atau perasaan, maka manusia dan kehidupannya terpisah dengan alam, dan juga merenggangkan hubungan-hubungan antar individu dalam komunitas. Satuan individu-individu dalam masa ini dominan terikat oleh perhitungan untung rugi yang sifatnya ekonomis dan politis, makanya dia disebut "masyarakat", bukan lagi "komunitas". Kita perlu kembali menghayati nilai-nilai yang penuh kebajikan itu untuk mendasari praktek hidup dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk dan dinamis. Ini bukan romantisme terhadap masa lalu, melainkan sebuah penggalian ulang sistem nilai ketika persoalan kekinian kita ternyata tak bisa lagi dijawab hanya dengan mengandalkan pemikiran-pemikiran modern yang tersentral dan tidak khas konteks kita.

Tou Minahasa punya modal, bukan hanya untuk bisa bertahan berhadapan dengan imperialisme kebudayaan global, melainkan juga memiliki kekuatan untuk maju. Kearifan lokal Minahasa yang banyak dan masih perlu digali, adalah kekayaan peradaban yang pantas dimaknai dalam konteks sekarang. Nilai-nilai budaya Minahasa memiliki kekuatan luar biasa untuk melawan hegemoni kebudayaan global, dan juga terutama untuk membangun kekuatan intelektual, moral dan spiritual. Dari segudang kearifan lokal itu, masyarakat bisa bertransformasi menjadi otonom, karena berpengetahuan, bermoral dan berspiritual. Dari kearifan lokal ini *Tou* Minahasa bisa merancang aksi, membangun gerakan, menghasilkan karya, memajukan sistem ekonomi yang humanis, mempraktekkan politik yang demokratis dan manusiawi demi hidup yang lestari. Dengan sistem nilai tersebut, *Tou* Minahasa benar-benar kembali menjadi manusia yang beridentitas dalam memajukan tanah ini, dan dalam pergaulan dengan masyarakat global.

also working together in the spirit of togetherness, "mapalus". There are still many other values systems and cultural practices of Minahasa that we need to discover, elucidate, and revitalize to be interpreted in the modern context. This is important because when modern thinking dominates our way of thinking and our actions, rationalism, secularism, and a number of modern ideologies such as capitalism, communism, and atheism which mostly depend on the logics and ratio, and tend to ignore intuitions or feelings, then human beings and their life are separated from nature. It also estranges the relationships between individuals within a community. Individual units of today are mostly bound to the calculations of loss and profit which is of economic and political nature, and therefore is referred to as a "society", and no longer a "community". We need to grasp again these values full of wisdom as a basis of life practices in the world filled with noises and dynamics. This is not a sort of romanticism towards the past, but a rediscovery of a value system when our contemporary problems can no longer be answered only by depending on centralized modern thoughts that are not specific in our context.

Tou Minahasa has the capital not only to survive the imperialism of the global culture, but also to come forward. The many local wisdoms of Minahasa that need to be rediscovered are the wealth possessed by this civilization to be interpreted in the contemporary context. Cultural values of Minahasa have an amazing strength to fight against the hegemony of the global culture, and mainly to construct intellectual, moral, and spiritual strengths. From this whole local wisdoms, the society will be able to transform to be autonomous, as they have the knowledge, morality, and spirituality. From these local wisdoms, *Tou* Minahasa will be able to design actions, build a movement, result in some works, advance a humanistic economic system, and practice democratic and humane politic for an eternal life. With this value

**Dari kearifan lokal ini
Tou Minahasa bisa
merancang aksi,
membangun gerakan,
menghasilkan karya,
memajukan sistem eko-nomi
yang humanis,
mempraktekkan politik yang
demo-kritis dan manusiawi
demi hidup yang lestari**

system, *Tou* Minahasa truly returns to be human beings with Minahasa identity in building the land and in



Foto: www.melayuonline.com

EPILOG

Perubahan adalah sesuatu yang hakiki dalam proses kehidupan ini. Kita tidak bisa menghindarinya. Tetapi, perubahan yang didorong oleh nilai-nilai kebudayaan sendiri, atau dialektika seimbang dengan nilai-nilai dari luar bukan saja benar dan baik, melainkan juga kuat serta terarah. Sebab, kita sendirilah, *Tou* Minahasa yang memiliki peradaban, dan yang lebih tahu ke mana kita pergi, apa capaiannya dan apa yang harus kita lakukan. Kita bukanlah subyek yang baru akan berproses, melainkan subyek yang sedang berproses, dan di tengah proses itu, penetrasi kebudayaan asing yang hadir menggoda telah memperlambat proses atau memaksa kita menyimpang dari jalan yang sedang dilalui. Maka, kita perlu berteriak "*I Yayat U Santi*"!!! ("Angkatlah pedangmu, dan acungkanlah ke arah musuh") Musuh kita tak selamanya berbentuk fisik atau material. Wacana yang samar sebagai hasil produksi para imperialis sedang mengancam kita. Mari kita lawan itu dengan kearifan lokal, nilai-nilai luhur dari peradaban ini.

Salam pergerakan dari bukit inspirasi Tomohon!

association with the global society.

EPILOGUE

Change is something basic in this process of life. It is something we all cannot avoid. However, the changes encouraged by our own cultural values, or with a balanced dialectic with outside values are not just correct and good, but also strong and targeted. We, the *Tou* Minahasa with the civilization, know best where we should go, what we mean to achieve and what we have to do. We are not just about to enter a process. We were in the middle of a process, and in the middle of our journey, there was a penetration of a foreign culture that had tempted and slowed down the process or forced us to deviate from the way we went through. Therefore, we need to yell "*I Yayat U Santi*"!!! "Raise your swords, and point them to the enemies". Our enemies do not forever take a physical or material form. An unclear discourse produced by the imperialists are threatening us. Let's fight it with our local wisdoms, the noble values of this civilization.

Tomohon Inspiration Hill,
6 May 2010

1. Tulisan ini pernah disampaikan dalam diskusi budaya "Membongkar Sentralisme dan Imperialisme Kebudayaan" di hotel Tou Dano Jumat, 7 Mei 2010 dalam rangka Peluncuran Majalah *Waleta* Minahasa

2. Penulis adalah pekerja budaya dan dosen pada Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT)

1. This writing was conveyed in a discussion on culture "*Membongkar Sentralisme dan Imperialisme Kebudayaan / Taking Apart Centralism and Imperialism of Culture*" at Tou Dano hotel, Friday, 7 May 2010 in Launching of *Waleta* Minahasa Magazine

2. Writer is a cultural worker and a lecturer at the Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT / Tomohon Christian University of Indonesia)

LAPORAN KEGIATAN INTERFIDEI

1. PERTEMUAN KOMITE EKSEKUTIF ACRP

Tanggal 11-12 Mei 2010, Asian Conference of Religions for Peace (ACRP) mengadakan pertemuan Komite Eksekutifnya (Executive Committee/ EC) di Beijing, Cina. Ini pertemuan tahunan dari EC-ACRP untuk membicarakan kegiatan sepanjang tahun yang lewat dan rencana untuk tahun mendatang. Jadi, lebih sebagai business meeting. Yang hadir ada 48 orang dari 17 negara (satu tidak hadir, Mongolia), termasuk 3 anggota EC dari Indonesia, yaitu: Theophilus Bella, Haryanto, SJ, Elga Sarapung dan Din Syamsuddin sebagai moderator ACRP, ditambah dengan 1 tamu khusus dari WCRP. EC-ACRP mempunyai 4 (empat) komisi: a) Lingkungan; b) Hak-hak Asasi Manusia; c) resolusi konflik; d) Keamanan manusia. Dalam pertemuan kali ini, atas usul Elga Sarapung, materi pertemuan tidak saja terfokus kepada soal bisnis kelembagaan tetapi juga materi yang lebih substansial, berkaitan dengan tema dari keempat komisi. Karena, di wilayah Asia, realitas persoalan tentang Lingkungan, Hak-Hak Asasi Manusia, Keamanan dan Konflik menjadi pengalaman sehari-hari yang signifikan, kaya dan memerlukan perhatian serius dari agama-agama, termasuk lembaga seperti ACRP. Usul ini diterima dengan baik, karena itu keempat tema tersebut dibicarakan dalam kelompok. Masing-masing kelompok merancang program untuk masing-masing issue. Diharapkan program itu dapat dijalankan selama dua tahun ke depan.*** (Es)

2. WORKSHOP PENGUATAN KAPASITAS JARINGAN GERAKAN ANTARIMAN

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pengalaman Interfidei dalam melaksanakan berbagai kegiatan di berbagai daerah dan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, lembaga atau komunitas keagamaan setempat. Berdasarkan pengamatan dan interaksi melalui pengalaman bersama dengan teman-teman jejaring, ditemukan ada cukup banyak organisasi/komunitas gerakan di beberapa daerah yang tidak berjalan dengan baik. Ada beberapa kendala yang diidentifikasi oleh teman-teman jejaring sendiri, antara lain berkaitan dengan motivasi, komitmen, kepercayaan diri, inisiatif, paradigma, jiwa/semangat volunterisme, manajemen dana, dan lemahnya keterampilan dalam mengelola gerakan, serta kurangnya pemahaman konteks lokal, nasional dan internasional.

Tujuan kegiatan ini adalah: 1) memperkaya partisipan dengan teori, wacana dan perspektif pluralisme agama dan dinamika antar dan intra agama, agama dan masyarakat, 2) memperkaya partisipan dengan pemahaman dan pengalaman manajemen masyarakat sipil/LSM/gerakan dan analisis sosial, 3)

REPORTS ON INTERFIDEI'S ACTIVITIES

1. FROM BEIJING

On 11-12 May 2010, Asian Conference of Religions for Peace (ACRP) held its Executive Committee/EC meeting in Beijing, China. This is an annual meeting of EC-ACRP to discuss the activities carried out during the year and the plan for the next year. In fact, it was more like a business meeting. There were 48 members from 17 countries attending the meeting (one was absent, Mongolia), including 3 EC members from Indonesia, namely: Theophilus Bella, Haryanto, SJ, Elga Sarapung, and Din Syamsuddin as the Moderator of ACRP, in addition to 1 special guest from WCRP. EC-ACRP has 4 (four) commissions: a) Environment; b) Human Rights; c) Conflict Resolution; and d) Human Security. In this particular meeting, with suggestion from Elga Sarapung, the material of the meeting is not only focused on organizational business, but also on more substantial materials, related to the theme of the four commissions. This is due to the fact that in Asian region, the reality of the issues on Environment, Human Rights, Security, and Conflicts are significant and rich daily experiences requiring serious attention from religions, comprising from institutions like ACRP. This suggestion was received well. The four themes were discussed in the commissions. Each commission design a program for each issue. It is expected that the program could be implemented in the next two years.*** (Es)

2. WORKSHOP ON CAPACITY BUILDING OF INTERFAITH MOVEMENT NETWORKS

This activity was initiated based on Interfidei's experience in carrying out various regions and it involved Non-Governmental Organizations (NGOs), universities, and local religious institutions or communities. Based on the experiences and interactions through collective experiences with our network friends, we found that there are quite many movement organizations or communities at the local level that are not well managed. There are a number of constraints identified by our network friends themselves, among others related to motivation, commitment, confidence, initiative, paradigm, spirit of voluntarism, budget management, the weak skill in managing the movement, and lack of understanding of the local, national, and international contexts.

The objectives of this activity are: 1) to enrich participants with theory, discourse, and perspective of religion pluralism and dynamics among and within religions, and between religions and the community, 2) to enrich participants with understanding and experience of management of civil society/NGO/social movement and

memberdayakan partisipan untuk menjadi motivator, inisiator, motor dalam membangun gerakan antariman di tingkat lokal. Kegiatan dilaksanakan dalam 2 tahap di dua daerah yang berbeda. Pelatihan tahap pertama dilaksanakan di Manado pada tanggal 22-27 Juni 2009 dengan fokus menggali pengalaman dan perspektif, memperdalam teori dan konsep pluralisme serta melakukan analisis sosial. Adapun tahap kedua dilaksanakan di Banjarmasin pada tanggal 9-15 November 2009 dengan fokus pada keterampilan mengelola organisasi, strategi pencarian serta pengelolaan dana.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang berasal dari 10 daerah yakni Kupang, Banjarmasin, Ambon, Kei, Medan, Padang, Semarang, Manado, Jayapura dan Makassar. Dalam kegiatan tahap pertama, Interfidei bekerjasama dengan Yayasan PEKA Manado dan pada tahap kedua, bekerjasama dengan Lembaga Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin.

3. PERKEMAHAN REMAJA ANTARIMAN (MALUKU DAN POSO),

Konflik Ambon dan Poso hingga saat ini masih meninggalkan trauma terutama bagi kalangan remaja yang mengalami dan menyaksikan apa yang terjadi, bahkan juga terlibat dalam konflik tersebut. Di sisi lain, perkembangan dan perubahan konteks sosial budaya di masyarakat salah satunya memberi dampak buruk bagi gaya hidup para remaja. Pergaulan bebas, narkoba, HIV/AIDS, dan tawuran, mewarnai gaya hidup mereka. Mereka berada di garis batas antara pola serta gaya hidup tradisional dan modern; peralihan dari suasana yang masih menyimpan dendam dan trauma ke ruang terbuka yang bebas dan menuntut saling hormat, saling menghargai, saling berinteraksi. Mereka dituntut untuk belajar membangun rasa percaya diri dan percaya kepada orang lain untuk membangun dan mengembangkan masa depan mereka yang lebih baik dengan jujur dan bertanggungjawab.

Perkemahan remaja antariman yang dilaksanakan oleh Interfidei bekerjasama dengan Kedutaan Selandia Baru di Indonesia dan PTD/UNDP Maluku dan Poso bertujuan menemani generasi muda dalam memahami konteks kemajemukan Indonesia, khususnya konteks Maluku/Poso, dan menemani mereka untuk siap dan percaya diri dalam mengantisipasi dan menghadapi berbagai kerentanan konflik, serta mengembangkan usaha-usaha perdamaian dengan hidup bersama saling percaya dan terbuka. Diharapkan pula bahwa mereka semakin mampu bekerjasama dalam menghadapi problem-problem sosial kemasyarakatan seperti HIV/AIDS, rendahnya pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan dan kerusakan lingkungan hidup.

Kegiatan dilaksanakan di SAV Puskat, Sinduharjo, Sleman pada tanggal 7-9 Juli 2009. Masing-masing daerah (Maluku dan Poso) mengirim 20 pelajar SMA dan 5 orang pendamping. Bentuk kegiatan berupa perkemahan dengan pola pembelajaran aktif-partisipatif,

analysis, 3) to empower participants to act as motivators, initiators, and motors in building an interfaith movement at the local level. This activity was carried out in 2 stages in two different regions. The first phase of activity was carried out in Manado on 22-27 June 2009 with a focus on discovering experiences and perspectives, develop theory and concept of pluralism, and conduct social analysis. The second phase was held in Banjarmasin on 9-15 November 2009 with a focus on the skills to manage organization and strategy of fund searching and management.

This activity was followed by participants from 10 areas namely Kupang, Banjarmasin, Ambon, Kei, Medan, Padang, Semarang, Manado, Jayapura, and Makassar. In the first phase of activity, Interfidei was working in collaboration with yayasan PEKA Manado and in the second phase with Lembaga Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan (LK3 / Religion and Community Study Center) Banjarmasin.

3. INTERFAITH YOUTH CAMP (MALUKU AND POSO),

The conflicts in Ambon and Poso still leave scars of trauma until today, especially for the teenagers experiencing and witnessing what happened; moreover for those being involved in the conflicts. On the other side, development and change of social-cultural contexts in the midst of the community was one of the factors giving bad impacts for the lifestyle of these teens. Free sex, drugs, HIV/AIDS, and gang war color their lifestyle. They are on the border line between the traditional and modern life style and patterns; a transition from a situation of vengeance and trauma to an open free space demanding mutual respect, appreciation, and good interactions. They are required to learn how to build their self-confidence and trust to others to build and develop a better future with honesty and responsibility for themselves.

Interfaith youth camp held by Interfidei in cooperation with New Zealand Embassy in Indonesia and PTD/UNDP Maluku and Poso was aimed to guide the young generation in understanding the context of plurality in Indonesia, especially in the context of Maluku/Poso, and guide them to be ready and confident in anticipating and dealing with various conflict vulnerabilities, in addition to developing concerted efforts for peace with a collective life with mutual trust and openness. It is also expected that they would be able to work together more in dealing with social-communal issues such as HIV/AIDS, low level of education, lack of working fields, and damage of environments.

The activity was carried out at SAV (Audio-Visual Studio) of Puskat, Sinduharjo, Sleman on 7-9 July 2009. Each region (Maluku and Poso) sent 20 (twenty) high school students and 5 (five) chaperones. The program is camping with active-participative learning method, collective learning for all participants, and out bond activities. The theme of this activity is "Collective Learning in the Youth Circle to Build a Peaceful Future in Maluku

proses belajar bersama di antara sesama peserta dan out bond. Tema kegiatan ini adalah "Belajar Bersama di Kalangan Remaja untuk Membangun Masa Depan yang Damai di Maluku dan di Poso"

4. LOKAKARYA GURU-GURU AGAMA "TANTANGAN BERSAMA AGAMA-AGAMA UNTUK MENJAGA KEUTUHAN CIPTAAN DENGAN MEMBANGUN SIKAP HIDUP RAMAH LINGKUNGAN"

Problem kerusakan lingkungan hidup salah satunya disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Pendidikan ilmu alam tentang konservasi lingkungan hidup yang diberikan di sekolah-sekolah telah memberi wawasan yang cukup memadai, namun hanya terhenti di tingkat kognitif dan belum menyentuh kesadaran yang menggerakkan. Selain itu, dalam konteks masyarakat Indonesia, 'bahasa agama' adalah bahasa yang mempunyai kekuatan untuk menggugah dan mendorong pembaharuan perilaku yang kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Hal ini antara lain pernah diwujudkan oleh *Conservation International Indonesia* yang telah menginisiasi gerakan konservasi lingkungan desa dengan merangkul pesantren-pesantren di pedesaan. Dalam kerangka pendekatan keagamaan ini, persoalan lingkungan hidup semestinya juga bisa menjadi wahana yang mempertemukan umat dari berbagai komunitas agama untuk duduk, bertukar pikiran, berefleksi dan bekerjasama.

Kegiatan ini ditujukan untuk memperluas wawasan guru-guru agama tentang ilmu pengetahuan lingkungan hidup, persoalan-persoalan lingkungan hidup serta dampaknya bagi kehidupan, membangun pemahaman bersama di kalangan guru-guru agama bahwa kesalehan dalam beragama tidak hanya kesalehan terhadap sesama manusia, melainkan juga terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup yang aman bagi manusia, dan membangun solidaritas antar kelompok agama dalam menghadapi persoalan bersama berupa merosotnya kualitas lingkungan hidup dan dampaknya bagi kemanusiaan.

Kegiatan dilaksanakan di SAV Puskat pada tanggal 8-10 Juni 2009 dan diikuti oleh guru-guru serta pengajar agama-agama dari berbagai latar belakang agama di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Institut DIAN/Interfidei dan Forum Komunikasi Guru Agama DIY (FKGA)

5. STUDI AGAMA DAN MASYARAKAT LAMPUNG

Provinsi Lampung selama lebih dari 30 tahun menghadapi masalah kependudukan, ketersediaan lahan pertanian dan perkebunan, peluang kerja dan kemiskinan. Banyak penduduk asli dan pendatang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan Negara (hutan produksi, lindung dan konservasi). Akibat lemahnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kehutanan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi (terutama oleh pendatang spontan), kawasan hutan ini lambat laun

and Poso"

4. WORKSHOP FOR TEACHERS OF RELIGIONS: "A COLLECTIVE CHALLENGE FOR RELIGIONS TO MAINTAIN WHOLENESS OF CREATION BY BUILDING AN ENVIRONMENT-FRIENDLY OUTLOOK IN LIFE"

The issue of environmental damage is among others caused by a minimum level of knowledge on the significance of nature conservation. Natural science on nature conservation taught at schools has provided sufficient perspective; unfortunately, it stopped at a cognitive level and has yet to touch awareness that moves others. In addition, within the context of Indonesian society, the 'language of religion' is a language with the power to move and encourage reinstatement of a behavior that is insufficiently responsible to environment. This among others have been realized by the *Conservation International Indonesia* which has initiated a movement for conservation of village environment by engaging Islamic boarding schools (*pesantren*) at the rural areas. Within the framework of this religious approach, the issue of environment can also be a tool to encourage congregations from various religious communities to sit together, exchange their thoughts, do reflection, and work together.

This activity is aimed to broaden the horizon of teachers of religions on natural sciences, issues of environment, as well as its impacts for life, to build a collective understanding in the circle of teachers of religion that piety in living a religion does not merely mean piety towards fellow human beings, but also towards safe natural resources and environment for mankind, in addition to building inter-religious groups solidarity in dealing with a collective problem in the form of reduced quality of environment along with its effects for humanity.

The activity was held at SAV Puskat on 8-10 June 2009 and was followed by teachers of different religion backgrounds at the area of Daerah Istimewa Yogyakarta / Special Region of Yogyakarta. This activity was held by Institut DIAN/Interfidei in collaboration with Forum Komunikasi Guru Agama DIY (FKGA / Communication Forum of Teachers of Religions).

5. LAMPUNG STUDY OF RELIGION AND THE SOCIETY

The province of Lampung has for more and less 30 years faced issues of population, availability of agricultural land and plantation land, working opportunity, and poverty. A lot of natives and newcomers live in and around the vicinity of the State forest (production forest, protection forest, and conservation areas). As a consequence of the weak planning and implementation of forest development oriented on people's welfare and high rate of population growth (especially by spontaneous newcomers), this forest area sooner or later changes to a place for people's small business.

berubah menjadi tempat bagi usaha perekonomian rakyat.

Dengan latar belakang persoalan tersebut, kegiatan Studi Agama dan Masyarakat ini ditujukan untuk menggalang kekuatan bersama, terutama di kalangan agama-agama untuk menemukan solusi persoalan sosial masyarakat Lampung. Kegiatan berupa seminar dan lokakarya, diikuti oleh berbagai elemen masyarakat (FKLA, masyarakat adat/register, ormas agama, akademisi, LSM, dinas kehutanan dan media). Tema kegiatan adalah "Kepemilikan Tanah serta Fungsi Hutan dalam Perspektif Lintas Agama". Kegiatan ini terselenggara pada tanggal 28 - 31 Juli 2009 di Bandar Lampung atas kerjasama Interfidei, Forum Kerja Lintas Agama (FKLA) Lampung dan IAIN Raden Intan.

6. LOKAKARYA PENDIDIKAN AGAMA "MEMBANGUN WAWASAN BHINEKA TUNGGAL IKA MELALUI PENANAMAN NILAI-NILAI AGAMA"

Kegiatan dilaksanakan di dua tempat pada hari dan tanggal yang berbeda, Sleman dan Bantul. Di Bantul kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 - 6 Agustus 2009 dan di Sleman pada tanggal 10 - 12 Agustus 2009. Guru-guru agama dan praktisi pendidikan lainnya, baik yang berada di Bantul maupun Sleman menjadi peserta aktif kegiatan ini.

Konsep dasar kegiatan ini adalah menggali dan mengembangkan kembali wawasan kebhinnekaan melalui penanaman nilai-nilai agama. Dalam kegiatan ini, para guru diharapkan mampu mengelola kemajemukan masyarakat dan memberikan model pembelajaran yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan remaja.

7. STUDI AGAMA DAN MASYARAKAT "MEMAKNAI PLURALISME DALAM KONTEKS KEHIDUPAN MASYARAKAT KEI"

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Langgur, Kei pada tanggal 12-15 Oktober 2009. Terlaksana atas kerjasama Interfidei dan lembaga Yan Evav, Kei. Persoalan dasar yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah melemahnya peran agama dan adat dalam menghadapi perubahan dan perkembangan kehidupan sosial masyarakat Kei. Di satu sisi, adat dibuat tidak berdaya akibat penerapan UU No. 5 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyingkirkan peran adat di tengah masyarakat. Di sisi lain, masyarakat Kei hidup secara berkelompok berdasarkan agama yang dianut. Keadaan ini menciptakan fanatisme agama masing-masing dan mengabaikan adat dan budaya, karena perkembangan agama-agama di Kei berlangsung menurut budaya daerah asal mayoritas pemimpin agama yang bersangkutan, yang seringkali bukan orang asli Kei.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggali kembali sinergi kekuatan "tiga tungku" (adat-agama dan pemerintah), sehingga satu sama lain tidak saling mendominasi melainkan saling mendukung. Kegiatan melibatkan para tokoh agama, tokoh adat, akademisi, LSM dan pemerintah. Bentuk kegiatannya adalah seminar dan belajar bersama dalam kelas.

With the background of this issue, this program of Study on Religions and the Society was aimed to build a collective power, especially in the circle of religions, to find a solution to social issues of Lampung community. The activities conducted were a seminar and workshop, followed by various elements of the community (Forum Kerja Lintas Agama (FKLA / Inter-Religion Working Forum, customary / register society, religious organizations, academicians, NGOs, forestry service, and the media). The theme of this activity is "Land Tenure and Forest Function in Inter-Religion Perspective". This activity was held on 28 - 31 July 2009 in Bandar Lampung by Interfidei, Forum Kerja Lintas Agama (FKLA) Lampung, and IAIN Raden Intan.

6. WORKSHOP OF RELIGION EDUCATION "BUILD THE INSIGHT OF BHINEKA TUNGGAL IKA (UNITY IN DIVERSITY) THROUGH INCULCATION OF RELIGIOUS VALUES"

This activity was carried out at two venues on different days and dates, in Sleman and Bantul. In Bantul, this activity was held on 4 - 6 August 2009 and in Sleman on 10 - 12 August 2009. Teachers of religions and other educational practitioners, whether those domiciling in Bantul or Sleman were the active participants of this activity.

The basic concept of this activity was to discover and re-develop the perspective of Unity in Diversity through inculcation of religious values. In this activity, teachers are expected to be able to manage plurality of the community and give a learning model oriented in fulfillment of needs of the youth.

7. STUDY OF RELIGION AND THE SOCIETY "GIVING A MEANING TO PLURALISM IN THE CONTEXT OF LIFE OF KEI COMMUNITY"

The activity was carried out at Hotel Langgur, Kei on 12-15 October 2009 by Interfidei in collaboration with Yan Evav, Kei. The basic issue made as a background of this activity is the weakening of the role of religions and customs in dealing with changes and development of Kei community's social life. On one side, customs are made powerless by the implementation of Law No. 5 / 1979 on Village Government marginalizing the role of customs existing in the midst of the community. On the other side, the people of Kei live in groups based on the religion they embrace. This situation creates religious fanaticism and overlooks customs and traditions, as development of religions in Kei takes place in accordance with the local culture where majority of the related religious leaders originate in, which very often are not natives of Kei.

This activity is aimed to rediscover the synergy of the strength of the "three stoves" (customs, religions, and the government), so that they are not dominating each other, but instead support one another. This activity brought together religious figures, customary figures, academicians, NGOs, and the government. The form of the activity is seminar and in-door collective learning.

8. SEMILOKA “MEWUJUDKAN PAPUA TANAH DAMAI DENGAN WAWASAN DAN SEMANGAT PLURALIS MULTIKULTURALIS”

Papua adalah salah satu contoh terbaik untuk menggambarkan kemajemukan Indonesia. Paling kurang ada 252 suku asli tersebar di seluruh wilayah Papua. Masing-masing memiliki bahasa, tradisi dan budaya yang berbeda. Selain orang asli Papua, berbagai suku lain dari luar Papua juga sudah ada yang hidup di sana selama 20-30 tahun. Melihat realitas, keragaman di Papua menimbulkan persoalan yang sangat pelik. Masyarakat Tanah Papua masih sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan kelompok lain yang berbeda budaya dan agama. Gejala dan praktek hidup eksklusif dengan membangun kekuatan kelompok sendiri mewarnai relasi sosial masyarakat Papua. Untuk menyikapi keadaan ini, pendidikan adalah ruang publik yang memiliki peranan besar bagi perubahan pemahaman dan sikap hidup, sehingga kegiatan ini sengaja dikhususkan bagi para guru pendidikan agama di berbagai sekolah, negeri dan swasta. Tujuannya adalah agar para peserta yang berasal dari latar belakang budaya dan agama bertemu dan bersama-sama menyikapi kemajemukan agama dan budaya di Tanah Papua serta memikirkan upaya yang bisa dilakukan dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan Papua Tanah Damai.

Kegiatan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 3 - 6 November 2009 di Jayapura dengan menekankan pemahaman konsep pluralisme dan multikulturalisme dalam konteks Indonesia pada umumnya dan Tanah Papua pada khususnya. Tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 27 30 April 2010 yang berfokus pada pengalaman berinteraksi dengan dinamika keberagaman di sekolah-sekolah dan memikirkan bersama bagaimana membuat materi pembelajaran agama yang memiliki perspektif pluralisme dan multikulturalisme.

9. ZIARAH BERSAMA MENUJU PAPUA TANAH DAMAI (JAKARTA, MANOKWARI DAN JAYAPURA)

Kegiatan ini merupakan kunjungan balasan dari The Interreligious Solidarity Movement for Peace (IRSMP) Mindanao dalam rangka belajar serta berbagi pengalaman dan informasi tentang konteks daerah masing-masing. Kunjungan ini dilaksanakan pada 31 Januari 9 Februari 2010. Rombongan dari Mindanao berjumlah 4 orang, yaitu Fr. Angel C. Calvo, Atty. Paulino Ersando, Mr. Abdulrashim K. Kenoh, Mr. Jaafar Massal Kimpa. Dalam kegiatan ini, peran Interfidei adalah membantu dan terlibat dalam seluruh proses kunjungan serta merancang beberapa kegiatan kunjungan selama di Jakarta.

Kunjungan dilakukan di 3 daerah, Jakarta, Manokwari dan Jayapura. Selama di Jakarta, kegiatan yang dilakukan adalah kunjungan ke Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Litbang Depag, IMPARSIAL, Demos, dan Wahid Institut. Di Manokwari, rombongan dari Mindanao dan Interfidei menghadiri perayaan 155 tahun Pekabaran Injil di Tanah

8.A WORKSHOP ON “ACHIEVING PAPUA LAND OF PEACE WITH INSIGHT AND SPIRIT OF PLURALISM MULTICULTURALISM”

Papua is one of the best examples to depict plurality of Indonesia. There are at the very least 252 native tribes spread in the whole region of Papua, each with its own language, tradition, and culture. In addition to the natives of Papua, some of the various other tribes from out of Papua have also lived on the land for 20-30 years. If we see the reality, diversity in Papua set off very complicated issues. The people of the land of Papua still often experience difficulties in interacting with other groups of different cultures and religions. The symptoms and practice of an exclusive life by building on the strength of one's own group tint the social relationship of the people. In order to cope with this situation, education in the public sphere has a great role to change one's understanding and life attitude. Therefore, this program is targeted for teachers of religions in various schools, whether state or private-owned. The objective of this activity is for participants who are of different cultural and religious backgrounds, to meet and deal with the plurality of religions and cultures on the Land of Papua together, as well as to think of the efforts that could be made in the education sphere to bring Papua Land of Peace into reality.

The activity was carried out in 2 (two) stages. The first stage was carried out on 3 6 November 2009 in Jayapura with a focus on understanding of the concept of pluralism and multiculturalism within the context of Indonesia in general and Papua Land in specific. The second stage was implemented on 27 30 April 2010, focusing on interacting experiences with the dynamics of diversity at schools and brainstorming on how to fashion a learning material of religion with a perspective of pluralism and multiculturalism.

9.GROUP PILGRIMAGE TO PAPUA LAND OF PEACE (JAKARTA, MANOKWARI, AND JAYAPURA)

This activity was a return visitation from The Interreligious Solidarity Movement for Peace (IRSMP) Mindanao in studying and sharing of experience and information on the context of each region. This visit was held on 31 January 9 February 2010. There were 4 (four) members from Mindanao group, namely Fr. Angel C. Calvo, Atty. Paulino Ersando, Mr. Abdulrashim K. Kenoh, and Mr. Jaafar Massal Kimpa. In this activity, the role of Interfidei was to assist and to be involved in the whole visitation process as well as to plan some visitation activities while the group was in Jakarta.

The visits were held in 3 (three) areas: Jakarta, Manokwari, and Jayapura. While in Jakarta, the activities held were visit to the Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Litbang Depag (Research and Development Section of the Department of Religious Affairs), IMPARSIAL, Demos, and the Wahid Institute. In Manokwari, the group from Mindanao and Interfidei attended an anniversary of 155 years of Evangelism on

Papua dan Hari Jadi Provinsi Papua Barat ke-5. Ada beberapa rangkaian acara dalam memperingati perayaan ini, antara lain: 1) Seminar "Membangun Papua Tanah Damai" pada tanggal 4 Februari yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat (para pemimpin agama, akademisi, pemuda lintas agama, tokoh perempuan dan pemimpin masyarakat. Seminar ini menghasilkan pernyataan bersama untuk membangun dan mendorong terwujudnya Papua Tanah Damai. 2) Perayaan besar dalam rangka memperingati 155 tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua. Rombongan dari Mindanao dan Interfidei bersama dengan masyarakat Papua lainnya berkumpul di Pulau Mansinam, yang merupakan daerah pertama misi Injili dimulai di Papua. 3) Perayaan Hari Jadi Provinsi Papua Barat di Lapangan Karebosi. Perayaan menampilkan festival ragam budaya, tidak saja dari suku asli Papua, tapi juga suku-suku di luar Papua. Kunjungan terakhir adalah di Jayapura dengan menyelenggarakan Seminar bersama pemuda antariman dengan tema "Peran Pemuda dalam Mewujudkan Papua Tanah Damai".[]

the Land of Papua and the 5th Anniversary of West Papua Province. There was as series of events in commemorating these anniversaries, among others: 1) Seminar "Building Papua Land of Peace" on 4 February, attended by various elements of the society (religious leaders, academicians, inter-religious youths, woman figures, and community leaders. This seminar resulted in a collective statement to build and encourage the realization of Papua Land of Peace. 2) A big celebration was held commemorating 155 years of Evangelism on the Land of Papua. The group from Mindanao and Interfidei, along with other members of Papua community, gathered on the island of Mansinam, the first land visited by the evangelist mission in Papua. 3) Anniversary of West Papua province at the Karebosi field. This celebration presented diverse culture festival, not only from the native tribes of Papua, but also from tribes outside of Papua. The last visit was in Jayapura, with a Seminar with interfaith youths with the theme "The Role of Youths in Achieving Papua Land of Peace".[]

AGENDA KE DEPAN

1. Penerbitan buku:
 - A. Agama dan Negara, MM. Billah
 - B. Pluralisme dan Kebebasan Beragama, Djohan Effendi
2. Pendidikan:
 - A. Assesment di Halmahera, Papua Barat, Bali, Poso untuk kegiatan Pendidikan alternatif warga masyarakat tentang pluralisme agama
 - B. Capacity building tahap II Jejaring Antariman di Indonesia
3. Diskusi bulanan FKGA

AGENDA

1. Publication
 - A. Religion and State, MM. Billah
 - B. Pluralism and Religious Freedom, Djohan Effendi
2. Education
 - A. Assesment of Alternative Education for the Society on Religious Pluralism, in Halmahera, West Papua, Bali, Poso
 - B. Capacity Building II for Interreligious Network in Indonesia
3. FKGA Monthly Discussion

Yayasan Dian/Interfidei ***Dian/Interfidei Foundation***

Board Members: Djohan Effendi, Daniel Dhakidae, Zulkifli Lubis; Executive Board: A. Elga J. Sarapung (Director), Indro Suprobo (Vice Director), Ira Sasmita (Secretariate); Eko Putro Mardiyanto (Finance); Department Coordinators: Elga Sarapung (Education/Networking/Library/Documentation/Research); Indro Suprobo (Publication/Institution/Fundraising/HRD); Triny Rettob (Household); Staffs: Sarnuji, Frans Lambut, Margareth Aritonang, Susanto, Alfiat; Address: Jl. Banteng Utama 59, Perum. Banteng Baru Yogyakarta, 55581-Indonesia, Ph.: 0274-880149, Fax.: 0274 -887864, E-mail :dianinterfidei@yahoo.com. Website:<http://www.interfidei.or.id/>; No.Rek: Yayasan DIAN-Interfidei, Bank BNI Cabang UGM, Capem Pasar Colombo, No. 0039234672.

Demi Pengembangan Newsletter ini, kami terbuka terhadap saran dan kritik anda.
We are open to Suggestions and criticisms in order to improve this Newsletter.